

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
PELAKSANAAN PROGRAM DESA MANDIRI DI KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR (STUDI KASUS DI DESA PULAU CAWAN TAHUN 2007-2010)



TAPM DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER SAINS DALAM ILMU ADMINISTRASI BIDANG
ADMINISTRASI PUBLIK

Disusun Oleh:

ERWIN
NIM: 016125555

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013

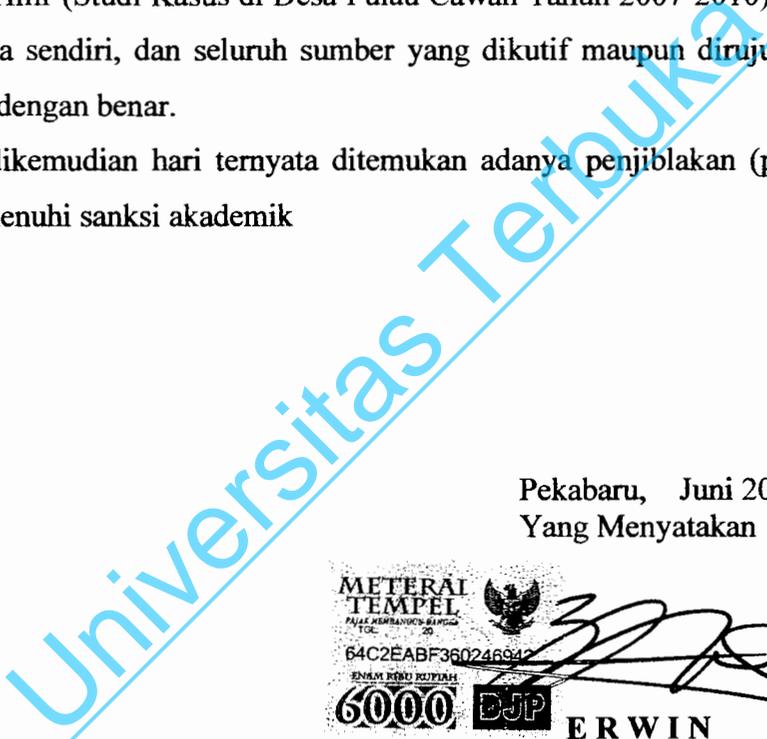
**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul; Pelaksanaan Program Desa Mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus di Desa Pulau Cawan Tahun 2007-2010) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagit), maka saya memenuhi sanksi akademik

Pekabaru, Juni 2013
Yang Menyatakan



ERWIN
NIM: 016125555

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Pelaksanaan Program Desa Mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus di Desa Pulau Cawan Tahun 2007-2010)

Nama : **ERWIN**
NIM : **016125555**
Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**
Hari/tanggal : **16 April 2013**

Menyetujui:

Pembimbing I,

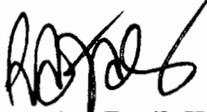

Dr. Khairul Anwar, M.Si
NIP. 19650707 199003 1003

Pembimbing II,


Daryono, SH., MA., Ph.D
NIP. 19640722 198903 1 019

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Magister Administrasi Publik


Florentina Ratih Wulandari, S.IP., M.Si
NIP. 19710609 198802 2 001

Direktur Program Pascasarjana


Sucrati, M.Sc. Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : **ERWIN**
 NIM : **016125555**
 Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**
 Judul TAPM : **Pelaksanaan Program Desa Mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus di Desa Pulau Cawan Tahun 2007-2010)**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Pasca Sarjana, Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Juni 2013
 Waktu : 13.45-15.45 WIB
 Tempat : Ruang Sidang UPBJJ-UT Pekanbaru
 Telah dinyatakan : **Lulus**

Panitia **PENGUJI TAPM** :
 Ketua Komisi Penguji : **Suciati, M.Sc, Ph.D** (.....)
 Penguji Ahli : **Dr. Syafhendri, M.Si** (.....)
 Pembimbing I : **Dr. Khairul Anwar, M.Si** (.....)
 Pembimbing II : **Daryono, SH., MA., Ph.D** (.....)

ABSTRACT**THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE AUTONOMY PROGRAM IN
INDRAGIRI HILIR REGENCY (CASE STUDY IN PULAU CAWAN
VILLAGE 2007-2010)****ERWIN**

Universitas Terbuka

erwin_bapeda@yahoo.com

Key word: Village Autonomy, Development, public policy

The research aims at finding the benefits and problems about “the implementation of village autonomy program in Cawan Island Village, Indragiri Hilir Regency 2007-2010”. This program was implemented four years and some development changes are being present in the village but in some areas such as in Cawan Island Village, Mandah district is not yet effective.

This research is a qualitative descriptive research to develop understanding about the program implementation. This research focuses on how effective the information delivery among two persons or more which includes the information exchange in personal or organization. It also further examines the ability of human resources and the facilities which support the policy, the characteristics which are held by implementator, such as commitment, honesty, and democratic values. In addition, it includes rational coordination of some people's activities to reach some general purposes through job division and the role and function of public authority and its responsibility.

The data were collected from the government officers of Indragiri Hilir regency, the head of BPPMPD Indragiri Hilir regency, the head of Bappeda Indragiri Hilir regency, the head of finance Indragiri Hilir Regency, the village headman of Cawan Island village, the Deputy of BPD, LPM, and society.

In summary, the implementation of government's policy of Indragiri Hilir regency including the village apparatus' attitude, social, economy, and cultural factors show a positive result. It is shown that the government's policy is well implemented. In addition the advantages from this policy are expected by the society in Cawan island village. In economic, social, and cultural aspects, they give some positive impacts from infrastructure development in Cawan Island under PNPM program.

ABSTRAK

PELAKSANAAN PROGRAM DESA MANDIRI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (STUDI KASUS DI DESA PULAU CAWAN TAHUN 2007-2010)

ERWIN

Universitas Terbuka
erwin_bapeda@yahoo.com

Kata Kunci, Pelaksanaan Program Desa Mandiri

Penelitian tentang “Implementasi Program Desa Mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir studi kasus di Desa Pulau Cawan tahun 2007-2010”, karena program ini telah dilaksanakan selama 4 (empat) tahun dan perubahan pembangunan di tingkat desa. Penelitian yang dilaksanakan dibatasi pada Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah dimana implementasi kebijakannya tidak berjalan dengan efektif atau kurang berhasil.

Penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif, tentang penyampaian informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara manusia dalam kapasitas sebagai pribadi atau atas nama organisasi, kemampuan sumberdaya manusia dan fasilitas-fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan, karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratik, koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab.

Subjek penelitian ini adalah pemeritahan Kabupaten Indragiri Hilir, Bupati, Kepala BPPMPD Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Desa Pulau Cawan, Ketua BPD, LPM, Masyarakat, dan objek penelitian ini adalah Implementasi Program Desa Mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir studi kasus di Desa Pulau Cawan tahun 2007-2010.

Hasil analisis program ini Secara keseluruhan implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dari aspek sikap aparatur desa dan aspek sosial, ekonomi dan budaya telah dilakukan dengan cukup baik karena semua indikator menunjukkan implementasi kebijakan Pemeritahan terlaksana dengan cukup baik dilapangan. Namun manfaat dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sangat diharapkan oleh Masyarakat Desa Pulau Cawan karena secara ekonomi dan sosial kebudayaan mendatangkan dampak yang positif dari pembangunan inprastruktur di Desa Pulau Cawa, program PNPM Mandiri ini. Kebijakan Pemerintah untuk menjelankan Program PNPM Mandiri Pedesaan sudah tepat, dengan melibatkan semua elemen untuk membangun Indragiri Hilir dari keterbelakangan pembangunan mengingat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Indragiri Hilir baik dari sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, sujud syukur kehadiran Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister yang berjudul **“Implementasi Program Desa Mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir studi kasus di Desa Pulau Cawan tahun 2007-2010”** dengan baik. Penulisan Tugas Akhir Program Magister ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahawa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari penyusunan Tugas Akhir Program Magister ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Suciati, M.Si, Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka.
2. Bapak Drs. Elfis Suanti, M.Si, Kepala UPBJJ-UT Pekanbaru selaku penyelenggara Program Pascasarjana.
3. Bapak Dr. Khairul Anwar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Daryono, SH., MA., Ph.D selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan hingga selesainya penelitian ini.
4. Kepala Bidang Florentina Ratih Wulandari, S.IP., M.Si, selaku penanggungjawab Program Pascasarna Manajemen Administrasi Publik
5. Kedua orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil pada penulis, sehingga TAPM ini dapat diselesaikan dengan baik, dan Istri tercinta serta ananda, yang selalu sabar dalam mendampingi penulis demi selesainya TAPM ini.
6. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM.

Pada penulisan TAPM ini, penulis menyadari masih banyak terdapatnya kekuarangan baik materi yang tercakup didalamnya maupun tata cara penyajiannya. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Harapan penulis semoga TAPM ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pikiran bagi berbagai pihak yang memerlukannya.

Akhirnya, semoga TAPM ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi kita semua dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan bersama. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata, namun manusia hanya berusaha untuk mendekati kesempurnaan, masukan dari pembaca sangat berarti bagi penulis dalam upaya untuk mendekati kesempurnaan. Sekali lagi terimakasih.

Pekanbaru, Juni 2013

Penulis,

ERWIN

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Relevan	13
B. Pengertian Pembangunan	16
C. Kebijakan Pembangunan Pedesaan.....	21
1. Kebijakan Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	22
2. Kebijakan pembangunan penanggulangan kemiskinan.....	23
3. Program Prioritas Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	27
4. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia.....	29
5. Pembangunan Infrastruktur	29
6. Pelestarian Pembangunan desa yang berwawasan lingkungan	30
D. Kebijakan Publik.....	31
E. Model Implementasi Kebijakan Publik	36
F. Kerangka Pemikiran	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Desain Penelitian	41
B. Pemilihan Informasi.....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Instrumen Penelitian	42
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	42
F. Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	47
B. Pembahasan Penelitian	53
1. Pelaku Kebijakan Paham Dengan Kegiatan Program Desa Mandir.....	53
2. Lingkungan, Sosial, Budaya Mempengaruhi Pelaksanaan Program Desa Mandiri.....	91
C. Hasil Penelitian	109
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Implementation as a Political and Administrative Process	38
Gambar 2.2: Kerangka Berpikir Penelitian	40

Universitas Terbuka

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Jumlah Program yang diterima Desa Pulau Cawan	4
Tabel 1.2: Realisasi Keuangan	6
Tabel 1.3: Jumlah Program yang diterima Desa Pelanggiran	7
Tabel 1.4: Realisasi Keuangan	8
Tabel 3.1: Matriks Data Penelitian.....	44
Tabel 4.1: Daftar Jumlah Sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir Keadaan Tahun 2012.....	51
Tabel 4.2: Pendidikan Non Formal di Kabupaten Indragiri Hilir	52

Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, pemerintah berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian melalui penerapan teknologi budidaya secara tepat dengan penggunaan sarana produksi sesuai teknologi yang direkomendasikan di masing-masing wilayah. Sarana produksi yang mempunyai peranan sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian antara lain adalah pupuk. Pupuk merupakan sarana produksi yang diutamakan penggunaannya oleh petani, setelah penggunaan benih, hal ini dikarenakan petani sudah menyadari pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian. Untuk itu pemerintah berkepentingan melakukan berbagai deregulasi kebijaksanaan di bidang pupuk dengan maksud agar terwujud iklim yang kondusif bagi perdagangan pupuk di Indonesia sehingga petani lebih mudah dalam mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya dan harga yang layak. Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan pupuk bersubsidi melibatkan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun di daerah serta stakeholder dari hulu sampai hilir. Untuk itu pemerintah mengupayakan adanya sinergi dari berbagai pihak yang terkait di bidang

pupuk baik di pusat dan daerah, sehingga pengelolaan pupuk dapat diarahkan untuk mendukung ketersediaan pupuk secara 6 tepat (tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga) guna terwujudnya ketahanan pangan nasional.

Mencermati bahwa pengguna pupuk terbesar adalah petani yang merupakan kelompok individu dengan tingkat kesejahteraan menengah ke bawah maka pengambilan keputusan di bidang pupuk harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini penting karena kebijakan di bidang pupuk bukan saja mempunyai implikasi teknis, tetapi juga politis yang pada gilirannya dapat mengganggu sistem kehidupan berbangsa secara keseluruhan. Berbagai kepentingan yang terkait dengan pupuk hendaknya selalu bermuara kepada upaya untuk menjunjung tinggi dan mengutamakan kepentingan petani yang sangat kita andalkan dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Dengan dukungan dari seluruh pihak terkait maka diharapkan persoalan pupuk yang kita hadapi dapat diatasi dan diselesaikan dengan terarah dan bijaksana.

Efektifitas penggunaan pupuk diarahkan pada penerapan pemupukan berimbang sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan. Dalam penerapan pemupukan berimbang sangat dibutuhkan modal yang cukup, sedangkan kemampuan permodalan petani sangat terbatas dalam membiayai kebutuhan usaha taninya. Untuk itu pemerintah bersama-sama legislatif memfasilitasi penyediaan subsidi pupuk untuk sektor pertanian, agar petani dapat menerapkan teknologi pemupukan berimbang guna meningkatkan produksi dan pendapatannya. Kebijakan pemberian subsidi pupuk untuk sektor pertanian tersebut telah dilakukan sejak tahun 2003 dan dilanjutkan sampai saat ini. Pada tahun 2012, sesuai

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, telah ditetapkan anggaran subsidi harga pupuk sebesar 16,944 triliun, untuk penyediaan pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik. Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap kebijakan subsidi pupuk tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota tentang kebutuhan pupuk di masing-masing wilayahnya. Peraturan-peraturan tersebut sebagai pedoman bagi produsen, distributor dan penyalur pupuk di Lini IV dalam menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya serta pedoman bagi kita terkait dalam pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai kewenangannya.

Upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar yaitu pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian serta semakin lemahnya daya beli masyarakat, sehingga sangat dituntut kemampuan sektor pertanian untuk tetap meningkatkan produksi pertanian melalui peningkatan mutu intensifikasi diantaranya dengan penggunaan varietas unggul yang diiringi dengan penerapan pemupukan berimbang sesuai rekomendasi spesifik lokasi. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian penerapan pemupukan yang lebih efisien sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk an-organik atau pupuk kimia

serta dapat mengurangi masalah kelangkaan pupuk sekaligus dapat lebih meningkatkan kesejahteraan petani.

Kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan, yang juga sebagai salah satu proses kebijakan setelah ditetapkannya produk hukum yang lebih tinggi. Kebijakan tersebut juga dipandang memiliki makna pelaksanaan di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan kebijakan atau program. Menurut Lester dan Stewart (2000: 104) implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun sebagai suatu dampak.

Sementara itu, Grindle (1980: 6) juga memberikan pandangannya tentang implementasi kebijakan dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi kebijakan mencakup terbentuknya "*a policy delivery system*" di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Program-program tindakan itu bisa dipilah-pilah ke dalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola. Maksud dari program-program tindakan dan proyek-proyek individual adalah untuk mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan.

Kebijakan subsidi pupuk yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan HET, besaran subsidi hingga sistem distribusi sudah cukup komprehensif. Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dengan HET yang telah ditetapkan. Secara lebih spesifik, masih sering terjadi berbagai kasus antara lain: kelangkaan pasokan yang menyebabkan harga aktual melebihi HET dan margin pemasaran lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum tepat, pengawasan yang belum maksimal, disparitas harga pupuk bersubsidi dan non subsidi yang cukup besar menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi masih belum tepat sasaran. Kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi ke luar petani sasaran masih sering ditemukan, sehingga menimbulkan kelangkaan dan harga pupuk melebihi HET.

Kebijakan penyediaan pupuk dengan harga murah melalui pemberian subsidi yang terus meningkat setiap tahun, menyebabkan semakin tidak efisiensinya penggunaan pupuk oleh petani dan meningkatkan ketidaktepatan sasaran subsidi pupuk yang seharusnya dinikmati oleh petani kecil tetapi dinikmati pula oleh pihak lain. Langka pasok dan lonjak harga serta penyaluran pupuk bersubsidi yang kurang tepat sasaran terus terjadi dan berulang setiap tahun erat kaitannya dengan aspek teknis (*data base* petani dan kepemilikan lahan) yang kurang akurat, aspek regulasi dan aspek manajemen.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil utama lada dan mempunyai peranan penting dalam perdagangan lada dunia. Tanaman Lada

merupakan salah satu jenis rempah yang paling penting diantara rempah-rempah lainnya (*King of Spices*), baik ditinjau dari segi perannya dalam menyumbangkan devisa negara maupun dari segi kegunaannya yang sangat khas dan tidak dapat digantikan dengan rempah lainnya. Pasokan lada Indonesia dalam perdagangan dunia dipenuhi dari provinsi Bangka Belitung yaitu lada putih dengan sebutan *Muntok White Pepper* dan Provinsi Lampung Lada hitam sebagai Lampung *Black Pepper* yang sudah dikenal sejak sebelum Perang Dunia ke dua. Indonesia pernah memiliki peran yang sangat penting dengan kemampuan memasok sekitar 80% dari kebutuhan lada dunia sebelum perang dunia II.

Untuk lada putih, meskipun saat ini Indonesia masih merupakan pengekspor utama di dunia, namun posisinya terancam oleh Vietnam. Areal pengembangan lada tahun 2008 mencapai 183.082 ha dengan produksi sekitar 80.420 ton yang tersebar di 29 provinsi dan hampir seluruhnya dikelola oleh rakyat (99,90%) dengan melibatkan sekitar 324 ribu kepala keluarga petani di lapangan. Dengan demikian, apabila satu kepala keluarga diasumsikan terdiri dari lima anggota keluarga maka usaha lada ini mampu menghidupi sejumlah 1,62 juta petani di lapangan. Belum termasuk masyarakat yang terlibat dalam perdagangan dan industri perladaan.

Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir terjadi pengurangan areal lada yang diakibatkan beberapa faktor antara lain kekeringan, serangan penyakit busuk pangkal batang, hama penggerek batang dan bunga, serta penyakit kuning dan kerdil utamanya di Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara dan konversi areal lada baik untuk

tambang maupun komoditi lain seperti kelapa sawit, karet dan kakao. Permasalahan yang dominan di lapangan adalah rendahnya produktivitas tanaman lada yang baru mencapai rata-rata 702 kg/ha pada tahun 2008 dari potensi di tingkat lapangan 2,5 ton/ha, atau di tingkat penelitian 4 ton/ha.

Tabel 1.1 Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Lada di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011

TAHUN	LUAS AREAL (Ha)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
2007	889,00	816,39	0,92
2008	412,00	821,00	1,99
2009	805,00	552,00	0,69
2010	918,00	637,00	0,69
2011	598,26	723,85	1,21
RATA-RATA	724,45	710,05	1,10

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Prov. Kep. Bangka Belitung

Kondisi tersebut antara lain diakibatkan intensitas serangan Hama dan Penyakit tanaman lada, belum menggunakan bibit unggul dan bersertifikasi, kurangnya pemeliharaan dan perawatan tanaman lada di tingkat lapangan, dan lemahnya permodalan yang dimiliki petani sehingga minimnya *supply input* dalam hal ini salah satunya yaitu pupuk bersubsidi.

Dengan mengacu pada pedoman umum yang ada dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah melalui dinas terkait yang membidangi pupuk melaksanakan tugas dan menjabarkannya ke dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan daerah sebagai upaya mewujudkan kebijakan subsidi pupuk. Pembinaan serta

bimbingan teknis di dalam memfasilitasi sarana produksi (pupuk) kepada masyarakat/petani merupakan bentuk peran pemerintah daerah dalam upaya memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Disamping itu pengertian dan status pupuk bersubsidi yaitu pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah, untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Di dalam implementasinya peraturan-peraturan tersebut, khususnya pupuk bersubsidi banyak dihadapkan pada kendala dan masalah yang perlu segera diatasi terutama dalam hal langkanya ketersediaan pupuk bersubsidi di tingkat petani, dan lemahnya pengawasan dalam penerapan kebijakan subsidi pupuk di tingkat lapangan sehingga belum memberikan pengaruh yang signifikan dalam peningkatan produksi dan produktifitas pertanian di Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PETANI LADA DI KABUPATEN BANGKA TENGAH.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana implementasi kebijakan subsidi pupuk dalam meningkatkan produktivitas petani lada di Kabupaten Bangka Tengah.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan subsidi pupuk dalam meningkatkan produktivitas petani lada di Kabupaten Bangka Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Selain itu diharapkan juga agar penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk menerapkan kebijakan subsidi pupuk dalam meningkatkan produktivitas petani lada. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini di Kabupaten Bangka Tengah antara lain:

1. Manfaat Praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah untuk mengembangkan konsep kebijakan subsidi pupuk dalam rangka meningkatkan produktivitas petani lada.
2. Manfaat Teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan terhadap ilmu Administrasi Publik di bidang kajian implementasi kebijakan khususnya subsidi pupuk serta memberikan sumbangan informasi ilmiah untuk penelitian selanjutnya.

E. Signifikansi Studi

Penelitian terdahulu sangat penting untuk mengetahui apa saja yang bisa disimpulkan, saran-saran dan penyelesaian masalah dari penelitian tersebut sebagai pembanding bagi penelitian Analisis Implementasi Kebijakan Subsidi

Pupuk Dalam Meningkatkan Produktivitas Petani Lada di Kabupaten Bangka Tengah. Di bawah ini peneliti mencoba menampilkan penelitian terdahulu yang terkait dengan implementasi kebijakan subsidi pupuk :

1. Tesis dengan judul “Studi Implementasi Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Tuban” oleh Joko Purnama, pada Program Studi Magister Studi Kebijakan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Dari tesis tersebut diperoleh rekomendasi sebagai berikut :

Pada penentuan alokasi pupuk bersubsidi sebaiknya pemerintah pusat mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dibuat oleh petani maupun pemerintah kabupaten, perlu adanya kepastian jenis dan jumlah pupuk bersubsidi dalam satu paket penjualan, perlu dipertimbangkan lagi aktor yang terlibat dalam jaringan distribusi pupuk bersubsidi, serta perlu perbaikan dalam penentuan penanggung jawab rayonisasi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

2. Artikel dengan judul “Kebijakan Subsidi Pupuk : Ditinjau Kembali” oleh Susila (2010), dari artikel ini didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Kebijakan subsidi pupuk yang selama ini diterapkan telah menimbulkan beberapa masalah seperti distribusi yang tidak adil dan tidak tepat sasaran, dualisme pasar, penggunaan pupuk yang berlebihan, biaya subsidi lebih besar dari manfaat, serta menghambat pengembangan industri pupuk nasional. Di sisi lain, subsidi pupuk memberi dampak

positif dalam meningkatkan modal petani, mendorong adopsi teknologi, serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.

Terkait dengan dualisme tersebut, dua pilihan kebijakan diusulkan. Pilihan pertama adalah melanjutkan kebijakan subsidi pupuk dengan memperbaiki perencanaan, pemantauan, sistem distribusi, dan pemberdayaan penyuluh lapangan. Pilihan kedua adalah menggantikan kebijakan tersebut dengan kebijakan lain yang lebih efektif. Kebijakan pengganti dapat berupa subsidi benih unggul, subsidi kredit, perbaikan dan pemeliharaan saluran irigasi, subsidi alat mesin pertanian, perbaikan pemasaran, dan pemberdayaan penyuluh lapangan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat memilih salah satu kelompok kebijakan atau mengombinasikan kedua kelompok kebijakan tersebut sesuai dengan ketersediaan anggaran dan tingkat efektivitas pencapaian sasaran yang diinginkan.

3. Artikel dengan judul “Implementasi Kebijakan Perberasan di Tingkat Petani : Kinerja dan Perspektif Ke Depan” oleh Sembiring, Harianto, Siregar dan Saragih (2010) dari artikel ini didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Benih Unggul, pupuk bersubsidi dan perbaikan jaringan irigasi tidak efektif, sebaliknya implementasi kebijakan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah kering Panen dan Gabah Kering Giling efektif. Implementasi kebijakan bantuan langsung benih unggul, pupuk bersubsidi dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tidak efektif menyebabkan kelangkaan pupuk,

pemupukan berimbang tidak tercapai dan biaya produksi yang dikeluarkan petani meningkat, dan membuka kemungkinan terjadinya konversi lahan sawah, sehingga tujuan kebijakan perberasan tidak tercapai.

Upaya pencapaian tujuan kebijakan perberasan yang efektif sebaiknya pemerintah memberikan Bantuan Langsung Benih Unggul kepada petani minimal 25 kg per ha dan memfasilitasi pendistribusiannya melalui Petugas Penyuluh Lapangan. Pemerintah perlu melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, tidak mengeluarkan kebijakan menaikkan harga pupuk bersubsidi, menyalurkan pupuk bersubsidi ke petani tepat waktu, menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan, mengusahakan kenaikan harga gabah lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi, meneruskan kebijakan pupuk bersubsidi, dan meningkatkan status Petugas Penyuluh Lapangan harian menjadi Pegawai Negeri Sipil. Upaya lainnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah antara lain melakukan pembangunan irigasi dan perbaikan sistim jaringan irigasi, melakukan pembelian langsung gabah petani, dan memfasilitasi pembentukan koperasi petani di tingkat desa atau kelompok tani.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa pada penelitian ini analisa kebijakan subsidi pupuk yang dilakukan mengambil *locus* di Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Teori Merilee Grindle dan desain penelitiannya adalah deskriptif kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Mulyono, “Studi Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan Di Desa Muntuk Kabupaten Bantul”. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Hasil penelitian yang dilakukannya, bahwa Desa Muntuk merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Bantul, merupakan desa rawan pangan dengan jumlah KK miskin yang cukup besar. Dengan program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul sebagai suatu upaya kegiatan pemberdayaan masyarakat terkesan kecil, baik dari sisi cakupan kegiatan maupun besaran dana yang diimplementasikan, namun program desa mandiri pangan ini sangat strategis karena merupakan upaya pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin di lokasi desa yang mengalami masalah rawan pangan untuk dapat memotivasi dalam berusaha menciptakan pendapatan bagi keluarga.

Program pemberdayaan masyarakat seperti yang ada di program desa mandiri pangan ini merupakan salah satu program pemberdayaan yang masih jarang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini terlihat dari sistem dan pengelolaan kelompok dampingan. Desa mandiri pangan sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat telah berhasil mendudukkan pemberdayaan sesuai dengan tempatnya dan porsinya. Tepat dimaksudkan adalah program bekerja sesuai porsinya sebagai pemberdaya (bukan memberdayai). Program desa mandiri pangan adalah program yang terkonsentrasi ke dalam pemberdayaan

masyarakat untuk mewujudkan aspek pendapatan/ekonomi dan sosial yang mana dari aspek-aspek dimaksud merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan karena saling dukung dan berhubungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Husinsyah dengan judul; Dampak Program Desa Mandiri Pangan terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Masyarakat di Desa Birang Kec. Gunung Tabur Kabupaten Berau, Jurnal EPP.Vol.6.No.2.2009.16-25, Program Studi Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman. Berdasarkan hasil penelitian Dampak Program Desa Mandiri Pangan Terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Masyarakat di Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak program desa mandiri pangan terhadap tingkat ketahanan pangan masyarakat di Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau sangat kuat sebesar 82%, sedangkan sisanya 18% dipengaruhi oleh faktor lain. Kegiatan program desa mandiri pangan yang telah efektif dilaksanakan adalah pelatihan, penguatan modal, sarana dan prasarana, dan teknologi.
2. Ada perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah pelaksanaan program desa mandiri pangan, dimana rata-rata pendapatan petani sebelum program sebesar Rp.4.049.673,41 sedangkan sesudah sebesar Rp.6.990.689,66.

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Purnamasari, Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Berdasarkan pembahasan dari penelitian yang telah disajikan, maka kesimpulannya adalah Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi belum dilaksanakan secara optimal, karena Beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-masing desa belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang Kecamatan. Beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke proses perencanaan pembangunan Kabupaten.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi masih rendah, karena fokus perencanaan, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan atau identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat di tingkat RT/RW belum dilakukan secara menyeluruh.

Partisipatoris, dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh waktu dan tempat serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi. Legalitas Perencanaan, dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, serta menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Nur, Sitti Bulkis dan Hamka Naping, Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus: Program Alokasi Dana Desa di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Bialo pada proses pembangunan infrastruktur desa yang dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap persiapan berupa kehadiran dan ide atau pemikiran. Pada tahap pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa sumbangan tenaga, material dan dana. Sementara pada tahap pemeliharaan bentuk partisipasi hanya berupa sumbangan tenaga.

Aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi yang ditinjau dari jumlah keluarga sejahtera dan jenis pekerjaan dalam hal ini tipe pertanian memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi masyarakat pada semua tahap, sementara tingkat pendidikan hanya berhubungan dengan partisipasi masyarakat pada tahap persiapan sedangkan homogenitas masyarakat tidak mempunyai hubungan terhadap partisipasi masyarakat.

B. Pengertian Pembangunan

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (*under-development*) ketergantungan

(*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994). Sedangkan Tikson (2005) membaginya kedalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

Pengertian *pembangunan* mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata *pembangunan*. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, *pembangunan* dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti

pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Bratakusumah, 2005).

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Kartasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip

kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Bratakusumah, 2005).

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada

penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, *pembangunan* adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Bratakusumah, 2005).

Proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para Ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya, Siagian (1983) dalam bukunya *Administrasi Pembangunan* mengemukakan, "Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu

kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Desa Mandiri (PNPM LMP) mengacu pada tiga kebijakan utama yaitu : a. Kebijakan Pembangunan Pedesaan, b. Kebijakan Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, serta c. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah RI Tahun 2010-2014.

C. Kebijakan Pembangunan Pedesaan

Arah kebijakan pembangunan Pedesaan tahun 2010-2014 adalah memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah produksi; serta meningkatkan daya tarik Pedesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan. Prinsip pembangunan Pedesaan, meliputi:

(1) Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat, yang berorientasi kepada karakteristik dan kebutuhan serta aspirasi lokal; (2) Pembangunan yang partisipatif; kepemimpinan lokal dan kelembagaan Pedesaan berperan penting dalam proses menuju keberlanjutan pembangunan; (3) Berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem wilayah Pedesaan diperlukan penataan ruang Pedesaan yang dapat mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan dan wilayah yang didukungnya, serta konservasi sumber daya alam.

Pendekatan pembangunan Pedesaan adalah: (1) Pembangunan Pedesaan dalam rangka memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan wilayah Pedesaan; dan (2) Pembangunan Pedesaan dalam upaya membangun desa mandiri menuju desa yang memiliki daya saing.

1. Kebijakan Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Arah kebijakan pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014, yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat dan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

Rumusan strategi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah : (1) penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan serta sumber daya kehutanan sesuai potensi daerah secara terpadu yang didukung dengan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan; (3) pengembangan sumber daya

air; (4) pengembangan industri kelautan dan perikanan; serta (5) pengembangan sumber daya mineral. Sedangkan rumusan strategi untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan adalah : (1) penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) pelestarian dan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; (3) pemantapan kelembagaan dan kapasitas antisipatif dalam penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; serta (4) pengelolaan lingkungan yang didukung oleh semua sektor terkait.

2. Kebijakan Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan

Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan adalah: (1) meningkatkan pertumbuhan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dan efektif menurunkan kemiskinan; (2) melengkapi dan menyempurnakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat miskin, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; (3) meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah. Selanjutnya berkaitan dengan arah kebijakan yang kedua, maka dirumuskan fokus kegiatan penyempurnaan, peningkatan efektivitas PNPM Mandiri, antara lain, dengan: (i) memperkuat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan PNPM Mandiri di kecamatan yang tergolong miskin; (ii) meningkatkan fungsi kelembagaan yang dibangun melalui PNPM Mandiri sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/daerah; dan (iii) mengintegrasikan secara selektif PNPM Pendukung untuk mendukung

percepatan penanggulangan kemiskinan. Dari sudut pandang implementasi kebijakan, pelaksanaan PNPM LMP didasarkan pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) sebagai salah satu program yang mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi RPJM 2010-2014. PNPM Mandiri merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat.

PNPM Mandiri merumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga tidak lagi sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Mulai tahun 2007 Pemerintah mencanangkan PNPM Mandiri dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di Pedesaan beserta program pendukungnya; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), dan PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Program Desa Mandiri Lingkungan Desa Mandiri adalah salah satu program pendukung yang merujuk pada pembelajaran yang terjadi pada Program Desa Mandiri. Dalam pelaksanaannya Program Desa Mandiri telah mencapai beberapa keberhasilan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan pembangunan desa.
2. Meningkatnya derajat partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi.
3. Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata seperti menyediakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan kelompok rakyat miskin.
4. Derajat keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan cukup tinggi.
5. Derajat efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan cukup tinggi.

Namun demikian pada pelaksanaan Program Desa Mandiri masih perlu ada perlu penekanan pada aspek-aspek pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Pentingnya aspek pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dijelaskan sebagai berikut :

1. Memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, SDA dan LH perlu dikelola dengan bijaksana agar

pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang.

2. Sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi, adanya kepentingan ekonomi yang berorientasi jangka pendek serta lonjakan jumlah penduduk akan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan sumber daya alam untuk bahan baku industry maupun konsumsi.

Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan pembangunan Pedesaan berupaya meningkatkan pencapaian kesejahteraan masyarakat Pedesaan dengan tetap menjaga bahkan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Pedesaan. Atas dasar itulah, maka PNPM LMP pada tahun 2008-2010 dilaksanakan di 4 provinsi sebagai lokasi percontohan di Sulawesi, dan ditambah 4 provinsi lagi di Sumatera pada tahun 2010-2012. Berkaitan dengan rumusan mekanisme pelaksanaan kegiatan, PNPM LMP mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan. Inpres ini mengamanatkan agar mekanisme pelaksanaan PNPM Mandiri melakukan integrasi dengan sistem perencanaan pembangunan khususnya dengan sistem perencanaan pembangunan desa. Integrasi tersebut meliputi:

- a. Menyusun mekanisme penyatuan perencanaan berbasis masyarakat ke dalam forum yang bersifat partisipatif di tingkat desa.
- b. Menyusun mekanisme pendampingan agar masyarakat desa mampu menyiapkan program jangka panjang menengah desa yang bersifat menyeluruh.

- c. Menyusun mekanisme agar program jangka panjang menengah desa yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan dengan program jangka panjang menengah desa yang reguler sehingga menghasilkan program berbasis masyarakat.
- d. Menyusun mekanisme agar aparat desa dapat mengakomodir dan memproses PJM desa sebagai bahan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat yang lebih tinggi.
- e. Menyusun mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan pemikiran untuk memperkuat kepedulian pemangku kepentingan pembangunan desa dengan pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta aktualisasi Perencanaan Pembangunan Desa melalui integrasi PNPM Lingkungan Desa Mandiri kedalam sistem perencanaan pembangunan desa yang bersifat reguler, maka dirumuskanlah Petunjuk Teknis Operasional PNPM Lingkungan Desa Mandiri (PTO PNPM LMP).

3. Program Prioritas Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Pembangunan Pedesaan merupakan salah satu prasyarat bagi upaya peningkatan pendapatan masyarakat untuk mencapai kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik dan tentunya juga diikuti dengan peningkatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

(<http://putracenter.net/2009/03/11/>)

Berikut ini program-program yang harus dilakukan:

1. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Pembangunan ekonomi kerakyatan pada intinya adalah mengelola seluruh potensi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan menerapkan prinsip atau asas ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi Pedesaan sejalan dengan pembangunan ekonomi kerakyatan. Pembangunan ekonomi Pedesaan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Pedesaan.

2. Program Pemberdayaan Usaha Kecil Pedesaan dengan kegiatan berupa penyediaan kredit tanpa bunga.

3. Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan dan peternak

4. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta pengusaha mikro kecil dan menengah melalui pembinaan pengusaha kecil, pengembangan industri kecil dan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi desa.

5. Pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menunjang industri kecil Pedesaan.

4. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu negara atau daerah. Saat ini, peranan SDM lebih menonjol dibandingkan dengan modal fisik dalam proses pembangunan ekonomi. Serta dilanjutkan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia wilayah Pedesaan diprioritaskan pada:

- a. Program pengembangan pendidikan
- b. Program peningkatan pelayanan kesehatan
- c. Pembinaan generasi muda, seni budaya, pemuda dan olah raga
- d. Program perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja.
- e. Pembinaan kehidupan beragama
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat

5. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas SDM. Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah.

Program yang dilakukan untuk pembangunan infrastruktur wilayah Pedesaan adalah:

- a. Membuka isolasi daerah-daerah yang terisolasi dengan pembangunan jalan-jalan Pedesaan.
- b. Pembangunan prasarana perekonomian dan pertanian.
- c. Pembangunan prasarana pemerintahan desa/kelurahan

6. Pelestarian Pembangunan Desa yang Berwawasan Lingkungan

Pembangunan Pedesaan yang baik tentunya harus yang berwawasan lingkungan. Misalnya dengan program ini:

- a. Reboisasi pada kawasan hutan serta penghijauan pada kawasan budidaya.
- b. Pembangunan tambak dengan sistem silfishery, sistem tandon dan empang parit.

Tentunya agar proses pembangunan Pedesaan berjalan secara teratur, maka diperlukan adanya kerangka kerja pembangunan Pedesaan yang hasilnya adalah rencana, baik rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-desa) maupun rencana pembangunan tahunan desa (RPT-Desa). Harapannya Semoga Indonesia semakin Maju.

D. Kebijakan Publik

1. Pengertian

Grindle (1980: 7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994: 15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (1980: 7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Menurut Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310), untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang

mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

2. Perspektif Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada *standard operating procedure* yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983: 5), terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir Perang Dunia II berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa

ternyata agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi, tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor dalam lingkungan politis.

Perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari pendekatan sistem terhadap kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-olah mematahkan perspektif organisasi dalam administrasi publik dan mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, perubahan preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Perspektif ini terfokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yaitu seberapa jauh konsistensi antara output kebijakan dengan tujuannya.

Ripley memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan (Ripley & Franklin, 1986: 11). Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Menurut Ripley, paling tidak terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni: (1) banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan (2) adanya program yang tidak didesain dengan baik. Perspektif kedua adalah perspektif faktual yang berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian.

Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai mengakui adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administratif. Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non-organisasional yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Grindle, 1980: 7).

Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu: (1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan (2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

E. Model Implementasi Kebijakan Publik

1. Implementasi Kebijakan *Bottom Up*

Model implementasi dengan pendekatan *bottom up* muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (*top down*). Parsons (2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model *bottom up* adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan consensus. Masih menurut Parsons (2006), model pendekatan *bottom up* menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.

Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan social dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Menurut Smith dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

- a. Idealized policy : yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya
- b. Target groups: yaitu bagian dari policy stake holders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan

oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan

- c. *Implementing organization* : yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
- d. *Environmental factors* : unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

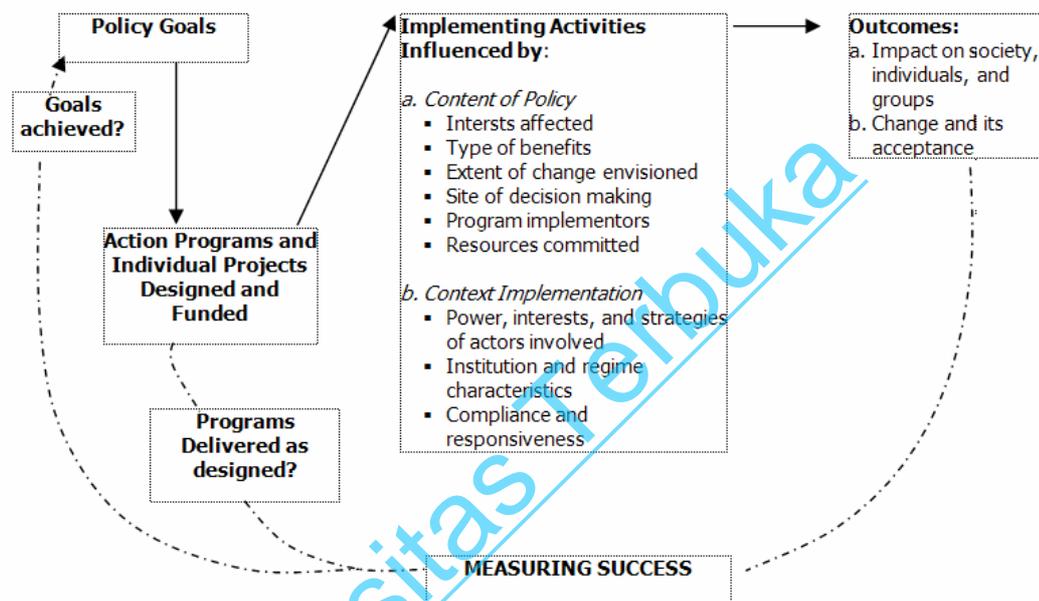
2. Implementasi Sistem Rasional (*Top-Down*)

Menurut Parsons (2006), model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan *top down* memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emile karya Rousseau : “Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia”. Masih menurut Parsons (2006), model rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem.

Grindle (1980: 6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor

kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Gambar 2: 1
Implementation as a Political and Administrative Process
 (Merilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey, p. 11)



Menurut Grindle (1980) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. Pelaksana program

f. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap

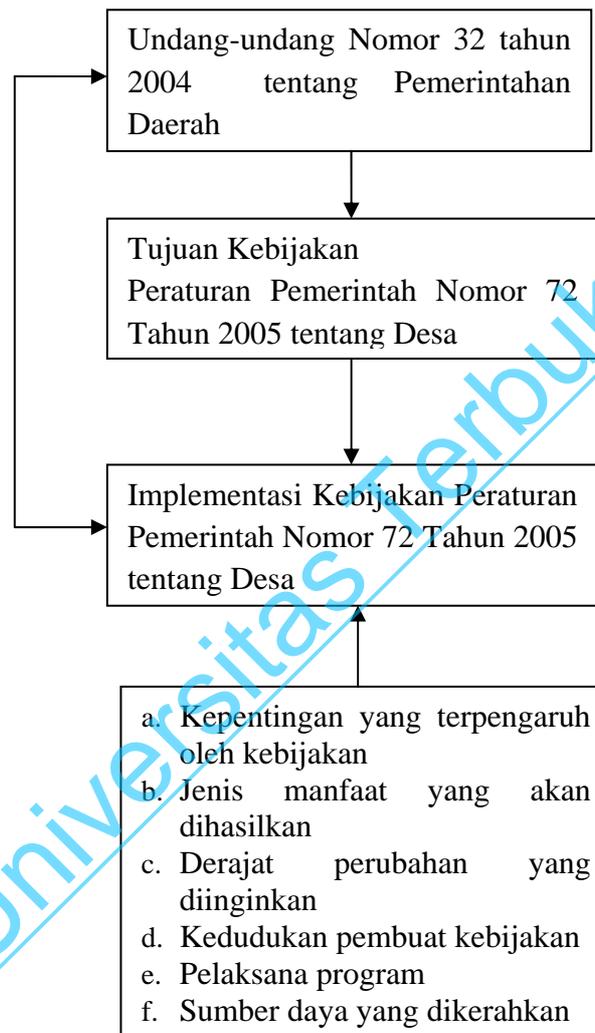
F. Kerangka Pemikiran

Otonomi desa merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa, penyelenggaraan anggaran urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), bantuan dan bantuan pemerintahan daerah. Salah satu sumber APB Desa adalah alokasi Dana Desa (ADD) yang formulasinya telah diatur berdasarkan SE Mendagri nomor 140/640/SJ tanggal 22 maret 2005. Namun dalam implementasinya, dipandang banyak kendala antara lain kesiapan lembaga kualitas SDM ditingkat desa, dukungan infrastruktur pedesaan yang memadai dan alasan-alasan lain sehingga diperlukan upaya yang terarah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Indragiri Hilir, program desa mandiri inilah yang menjadi ujung tombak pembelajaran sekaligus estafet untuk pelaksanaan otonomi desa seutuhnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka berpikir penelitian sebagaimana digambarkan dalam Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat *kualitatif*, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif (Basrowi dan Suwandi, 2008:2).

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *historis* dan *empiris* yaitu memotret permasalahan-permasalahan implementasi kebijakan program Desa Mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Pemilihan Informen

Sebelum peneliti melakukan pemilihan informan, maka terlebih dahulu ditetapkan situasi sosial atau *site* penelitian, yang merupakan tempat di mana permasalahan atau fenomena sosial yang akan diteliti betul-betul ada. Menurut Moleong, seperti yang ditulis dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, seperti yang ditulis dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, di dalam mendapatkan informasi yang benar valid, maka di dalam memilih informasi dapat dilakukan melalui wawancara pendahuluan, sebelum melakukan penelitian. Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan secara snowball. Cara ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dengan fokus penelitian informan yang dipilih adalah informan kunci (*key informan*).

Informan penelitian adalah Bupati Indragiri Hilir, Kepala Bappeda, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Desa, Masyarakat Pulau Cawan.

C. Lokasi Penelitian

Memilih Lokasi Penelitian di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, karena dekat dari tempat tinggal peneliti, menghemat biaya penelitian, serta tidak banyak waktu yang digunakan dalam penelitian, mengingat peneliti juga sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda Indragiri Hilir, selanjutnya peneliti merasa Pelaksanaan Program Desa Mandiri Di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus di Desa Pulau Cawan tahun 2007-2010) ini sangat menarik untuk diteliti dan tuangkan dalam bentuk karya ilmiah.

D. Instrumen Penelitian

Penelitian Dampak program pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri terhadap pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur apabila dianggap perlu untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dari responden.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi; dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan Program Desa Mandiri di Dusun dusun

yang ada di Desa Pulau Cawan, baik secara fisik maupun proses pelaksanaannya.

2. Wawancara; dilakukan terhadap responden yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang diperlukan, yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jumlah Responden yang di wawancarai berjumlah 20 orang yang terdiri dari Bupati, Ketua DPRD, Kepala Bappeda, Kabag Keuangan, Camat, Kepala Desa, Ketua LPM, Ketuan BPD, dan 12 orang masyarakat.
3. Dokumentasi; pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan implementasi kebijakan alokasi dana bantuan desa di Kabupaten Indragiri Hilir seperti Dokumen APBD, laporan Realisasi fisik dan keuangan serta laporan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini
4. Angket; pengumpulan data sekunder dengan mengajukan beberapa item pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Program Desa Mandiri.

Ketiga metode tersebut di atas digunakan di lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, yakni untuk memperoleh data primer, di samping dilakukan pengamatan secara langsung di lapangan, juga digunakan teknik interview terhadap responden yang telah ditentukan, dengan cara mengajukan pertanyaan yang berpedoman pada daftar pertanyaan (*interview guide*) yang telah disusun. Selanjutnya untuk membuktikan benar tidaknya jawaban atau pernyataan

responden, perlu didukung dengan data-data sekunder yang didapat dari studi dokumentasi.

Untuk lebih jelasnya jenis data, sumber data, metode pengumpulan data dapat dilihat dalam matrik Tabel 3.1

Tabel 3.1
Matriks Data Penelitian

Jenis Data	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data
Primer	<u>Policy maker</u> : Bupati Indragiri Hilir Kepala BPPMPD Kepala Bappeda Indragiri Hilir Kepala Bagian Keuangan Kepala Desa <u>Target Group</u> : Ketua BPD LPM Masyarakat	Wawancara Kuisisioner
Sekunder	Perda yang relevan, Laporan pelaksanaan kebijakan/ program desa mandiri, Profil Kab Indragiri Hilir, Profil Desa dan buku lain yang relevan. Buku , Makalah, Tulisan Ilmiah dan hasil penelitian yang relevan	Studi Dokumentasi Penelitian Kepustakaan

Sumber: Data Penelitian 2012

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah *kualitatif*. Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

Selanjutnya analisis data ini akan dilakukan secara induktif, yakni penganalisaan dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil dikumpulkan dari yang berbentuk khusus ke bentuk umum, atau penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai semua unsur-unsur penelitian yang tidak diperiksa/diteliti dalam penelitian mengenai dampak program pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri terhadap pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, setelah menyelidiki sebagian saja dari unsur-unsur tersebut sesuai dengan sampel penelitian yang ditetapkan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*, meskipun data yang dipergunakan bersifat kuantitatif, analisis yang digunakan adalah dengan cara melakukan interpretasi terhadap data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan melalui pemahaman intelektual dan pengalaman empiris, berdasarkan langkah-langkah: Pengumpulan data, yang dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan observasi; Penilaian data, yang dilakukan berdasarkan prinsip validitas, obyektivitas, reliabilitas melalui cara mengkategorikan data dengan sistem pencatatan yang relevant dan melakukan kritik atas data yang telah dikumpulkan dengan tehnik triangulasi; Interpretasi data, yang dilakukan dengan cara menganalisis data dengan pemahamn intelektual yang dibangun atas dasar

pengalaman empiris terhadap data, fakta, dan informasi yang telah dikumpulkan dan disederhanakan dalam bentuk tabel/grafik; Penyimpulan, terhadap hasil interpretasi data, yang dilakukan secara berurutan. Setelah data terkumpul melalui angket, data tersebut diolah dengan menggunakan rumus persentase (Sudijono, 2004:43).

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

- f = frekuensi yang sedang dicari persentasenya
 N = *Number of Cases* (jumlah frekuensi/banyaknya individu)
 P = Angka persentase
 100% = Bilangan Tetap

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang Implementasi Program Desa Mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir studi kasus di Desa Pulau Cawan tahun 2007-2010, maka dilakukan pengelompokan atas 5 kriteria penilaian yaitu sangat baik, cukup baik, kurang baik dan tidak baik, hal ini mengacu pada pendapat Arikunto, (2008:246). Adapun kriteria persentase tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Persentase antara 81% - 100% dikatakan “sangat baik”
2. Persentase antara 66% - 80% dikatakan “ baik”
3. Persentase antara 56% - 65% dikatakan “ cukup baik”
4. Persentase kurang dari 41% - 55% dikatakan “ kurang baik”
5. Persentase kurang dari 0 - 40% dikatakan “tidak baik”

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki "Negeri Seribu Parit" yang sekarang terkenal dengan julukan "Negeri Seribu Jembatan" dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. (<http://inhilkab.go.id/index.php/profil/kondisi-umum.html>, diunduh tanggal 5 Mei 2012)

Letatak Secara geografis daerah ini berada pada 0°36' LU, 1°07' LS dan antara 102°32' dan 104°10' BT, yang berbatasan dengan daerah sebagai berikut : Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi, di Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, sebelah Barat berbatsan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Kepri

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove) dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut. Sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Propinsi Jambi. Ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Sungai yang terbesar di daerah ini adalah Sungai Indragiri Hilir yang berhulu di pegunungan Bukit Barisan (Danau Singkarak), sungai Indragiri mempunyai tiga muara ke Selat Berhala, yaitu di Desa sungai Belu, Desa Perigi Raja dan Kuala Enok.

2. Topografi Indragiri Hilir

Topografi daerah Indragiri Hilir terdiri dari daratan dan perairan yang beriklim tropis basah, curah hujan tertinggi 1300 mm, hujan turun antara bulan oktober sampai maret setiap tahunnya. Sedangkan musim kemarau kadang-kadang hujan tidak turun selama 3 (tiga) bulan lamanya. Sehingga menimbulkan kesulitan air bersih, pengairan dan sebagainya. Angin yang bertiup sepanjang tahun adalah angin utara dan angin selatan. Pada waktu musim angin utara terjadi musim gelombang, serta air pasang yang cukup tinggi, yang membawa air laut berkadar garam ke hulu sungai, sehingga membawa pengaruh terhadap tingkat kesuburan

bagi tanam-tanaman tertentu yang tidak tahan terhadap kadar air dengan tingkat keasinan tinggi. (<http://inhilkab.go.id/index.php/profil/kondisi-umum.html>)

Kabupaten Indragiri Hilir menyimpan potensi besar dalam berbagai sektor Perekonomian, terutama dibidang Perkebunan, Perikanan/kelautan dan Perindustrian dimana sampai saat ini belum tergarap secara maksimal. Disektor perkebunan, beberapa komoditi unggulan adalah kelapa lokal, kelapa hibrida, kelapa sawit dan sagu.

Menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dan mempermudah investasi, Pemerintah Daerah telah membangun berbagai infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi untuk mempermudah akses dari dan keluar Kabupaten Indragiri Hilir, baik melalui jalur darat, laut maupun udara, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif yang mempermudah sektor swasta untuk menjadi pelaku bisnis di daerah ini.

3. Penduduk Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir ibaratnya Indonesia Mini, tempat bermukimnya berbagai suku bangsa, diantaranya populasi dengan jumlah yang cukup besar adalah suku Melayu, suku Bugis/Makasar, dan Banjar. Suku Melayu merupakan penduduk yang telah lama bermukim di daerah ini, kemudian dalam perjalanan waktu komunitas ini berassimilasi dengan komunitas lainnya yang datang kemudian. Kedatangan orang Bugis/Makasar dan Banjar berhasil bersama orang Melayu membuka perkebunan-perkebunan kelapa dan ladang-ladang padi yang luas dari hutan-hutan rawa yang sangat subur dengan membangun parit-parit yang

jumlahnya sangat banyak, sehingga Indragiri Hilir di kenal juga dengan sebutan negeri seribu parit, negeri penghasil kelapa terbesar dan sebagai lumbung padi.

Suku-suku lainnya seperti Minang, Jawa, Tapanuli dan sebagainya datang sebagai pedagang, buruh dan pegawai pemerintah yang pada umumnya tinggal di kota-kota dan pasar-pasar. Semua suku bangsa yang hidup di Indragiri Hilir ini dengan budaya dan tradisinya masing-masing hidup dengan damai berdampingan. Budaya mereka saling terjaga dan perlahan-lahan mulai berbaur menjadi pendukung budaya nasional. Mereka juga telah menjadi suatu generasi baru dengan cara pandang yang semakin maju dan ingin secara bersama-sama membangun tanah kelahirannya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak tertinggal dari daerah lainnya. Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri hilir berjumlah 669.657 jiwa. (Akses dari <http://www.inhilkab.go.id/index.php/Potensi-Daerah/penduduk.html>, tanggal 24 November 2012)

4. Keadaan Politik Kabupaten Indragiri Hilir

Keadaan politik di Indragiri Hilir sangat kondusif dan didukung oleh pemerintahan yang kondusif membuat Kabupaten Indragiri Hilir semakin maju dalam bidang pembangunan dan kemajuan ekonomi dan meningkatnya kemajuan sosial masyarakat. Namun dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Permendagri ini.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah seharusnya pemerintah mempunyai ruang untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi. Namun kebijakan itu terkadang tidak terlaksana dengan baik atau kurang maksimal dilakukan oleh pelaksana kebijakan, inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti ini dengan judul “Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Permendagri 59 Tahun 2007 di Kabupaten Indragiri Hilir”.

5. Sarana Pendidikan Pormal dan Non Pormal di Kabupaten Indragiri Hilir

Salah satu Kabupaten yang sedang menggalakkan pembangunan tentunya tidak akan terlepas dari dunia pendidikan, untuk selanjutnya dapat dilihat saran dan prasarana pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Daftar Jumlah Sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir Keadaan Tahun 2012

NO	KECAMATAN	JENJANG PENDIDIKAN														JLH	
		SDN	SDS	MIN	MIS	SLTPN	SLTPS	MTSN	MTS	SALAFIYAH	SMAN	SMAS	SMKN	SMKS	MAN		MAS
1	Tembilahan	34	1	0	3	3	3	1	4	0	1	2	2	0	0	2	56
2	Tembilahan. Hulu	16	0	1	8	3	1	0	5	1	1	0	0	0	1	2	39
3	Tempuling	49	2	0	13	4	0	0	9	0	1	1	0	1	0	3	83
4	Reteh	44	5	1	37	3	4	0	20	0	1	1	0	0	0	11	127
5	Enak	34	0	0	25	2	1	1	10	0	1	1	0	0	0	3	78
6	Kuala Indragiri	36	0	0	10	4	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	59
7	Keritang	27	9	0	33	4	0	0	17	1	1	1	0	0	0	4	97
8	Batang Tuaka	20	2	0	10	2	1	0	9	0	0	1	0	0	0	3	48
9	Tanah Merah	21	0	0	3	2	0	0	4	0	1	0	0	0	1	1	33
10	Gaung	23	3	0	22	3	0	0	12	0	1	0	0	0	0	1	65
11	GAS	20	1	0	5	3	1	0	7	0	1	0	0	0	0	2	40
12	Kateman	22	1	1	14	2	1	0	6	0	1	0	0	0	0	2	50
13	Mandah	43	4	1	20	2	1	1	14	1	1	0	0	0	1	0	89
14	Pulau Burung	20	2	0	1	1	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	37
15	Pelangiran	19	1	0	15	0	2	0	7	0	0	0	0	0	0	1	45
16	Kemuning	10	7	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	23
17	Teluk Belengkong	13	4	0	1	0	5	0	2	1	0	1	0	0	0	0	27
	JUMLAH	451	42	4	221	39	26	3	140	4	11	12	2	1	3	37	996

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bidang PLS tahun 2011

Tabel 4.2
Pendidikan Non Formal di Kabupaten Indragiri Hilir

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS KETERAMPILAN	PIMPINAN KURSUS	ALAMAT	KET
1	KOMPUTINDO	KOMPUTER	SURYANI	TEMBILAHAN	BERIZIN
2	DWIPA ABADI	PERBENGKELAN	Ir. AHLIM GINTING	SEI. GUNTUNG	BERIZIN
3	YANI SALON	SALON	YANI SABRAN	TEMBILAHAN	BERIZIN
4	SENAM DELFI	KESEHATAN	PENI SUSANTI	TEMBILAHAN	BERIZIN
5	HASTUTTI SALON	SALON	HASTUTI	TEMBILAHAN	BERIZIN
6	TITIN SALON	SALON	TITIN	TEMBILAHAN	BERIZIN
7	ORCID CLUB	KESEHATAN	MARIANI	TEMBILAHAN	BERIZIN
8	SAID KOMPUTER	KOMPUTER	ABD. HALIM	TEMBILAHAN	BERIZIN
9	MELLY BEATIFUL	SALON	ROSALINDA	TEMBILAHAN	BERIZIN
10	MELINDAR KOMP	KOMPUTER	M. IRWAN	TEMBILAHAN	BERIZIN
11	METRO SALON	SALON	ELLY	TEMBILAHAN	BERIZIN
12	VEC	BHS. INGGRIS	ERMA SUSANTI	TEMBILAHAN	BERIZIN
13	SURYANI SALON	SALON	SURYANI	TEMBILAHAN	BERIZIN
14	NANDA SALON	SALON	ENDRI YATI	TEMBILAHAN	BERIZIN
15	MAYA SALON	SALON	SURYA	TEMBILAHAN	BERIZIN
16	ALHUSNIAH	MENGETIK	MARDIAH	RETEH	BERIZIN
17	BERINGIN JAYA	MENGETIK	SULAIMAN	TANAH MERAH	BERIZIN
18	SMKN I	KOMPUTER	MULIADI	TEMBILAHAN	BERIZIN
19	PRIMA MEDIA KOMP	KOMPUTER	ABDULLAH	TEMBILAHAN	BERIZIN
20	INHIL TEKNOLOGI	KOMPUTER	ARYA WISUDI	TEMBILAHAN	BERIZIN
21	YAHMA KOMPUTER	KOMPUTER	SUPENDRI	TEMBILAHAN	BERIZIN
22	SEC	BHS. INGGRIS	SAFRI	TEMBILAHAN	BERIZIN
23	KOMP GAUNG UTAMA	KOMPUTER	ADE SUPIAN	GAUNG	BERIZIN
24	ICC	KOMPUTER	IBRAHIM, SPd	RETEH	BERIZIN
25	LISTA INSTITUTE	BHS. INGGRIS	MUKHLIS JUDIK	TANAH MERAH	BERIZIN
26	LISTA ACADEMIK	KOMPUTER	MUKHLIS JUDIK	TANAH MERAH	BERIZIN
27	AEC	KOMPUTER	AULIA. R NUR	TEMBILAHAN	BERIZIN
28	IRFAN KOMP. CUORSE	KOMPUTER	DENI IRFAN	RETEH	BERIZIN
29	KOMPUTER ELLYANS	KOMPUTER	SYOFIAN, SH	TEMBILAHAN	BERIZIN
30	KOMP. HIJAU. COM	KOMPUTER	ARDIANSYAH	TANAH MERAH	BERIZIN
31	SAID ENGLIS	BHS. INGGRIS	ABD. HALIM	TEMBILAHAN	BERIZIN
32	DESIGN TEKH. KOMP	KOMPUTER	KUMALA SARI	MANDAH	BERIZIN
33	ADITYA KOMPUTER	KOMPUTER	M. YUSUF	GAS	BERIZIN
34	RARA - RIRI KOMP	KOMPUTER	MIZWAR.E, SH	GAS	BERIZIN
35	GAUNG KOMPUTER	KOMPUTER	ADE SUPIAN, SE	GAUNG	BERIZIN
36	ALEXADER COMP. COLLEGE	KOMPUTER	HARFENTO, S.Kom	TEMBILAHAN	BERIZIN
37	SAFRI ENGLIS COURSE	BHS. INGGRIS	SAFRI, S.Ag	TEMBILAHAN	BERIZIN
38	DHEIN COMPUTER	KOMPUTER	SIRAJUDDIN	RETEH	BERIZIN
39	ELLYANIS	KOMPUTER	SOFYAN, SH	TEMBILAHAN	BERIZIN
40	HANDAYANI	MENJAHIT	Dra. BASRIANI	RETEH	BERIZIN

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bidang PLS tahun 2011

B. Pembahasan Penelitian

1. Sikap pelaku pembuat kebijakan dengan Kegiatan Program Desa Mandiri

Fokus identifikasi program desa mandiri pangan tahap persiapan dan penumbuhan adalah: 1) Seleksi desa yang meliputi seleksi desa mandiri, sosialisasi desa mandiri, penyusunan data dasar desa, penyusunan rencana pembangunan desa partisipatif. 2) Pemberdayaan masyarakat yang meliputi pendampingan, pelatihan, dan 3) Penguatan kelembagaan yang meliputi pembentukan kelompok fasilitator, pemberdayaan kelompok afinitas dalam mengimplementasikan kebijakan Program Desa Mandiri.

Desa Mandiri merupakan suatu cita-cita atas harapan yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang tahun 2025. Desa Mandiri merupakan tingkat perkembangan Desa Tertinggi.

Pada masa Orde Baru, tingkat perkembangan desa dikenal dengan Desa Swadaya, Swakarya dan Swasembada. Guna menggesa percepatan pembangunan desa di Indragiri Hilir ditetapkan tingkat perkembangan desa 4 tingkatan sebagai berikut;

1. Desa Miskin
2. Desa Berkembang
3. Desa Maju
4. Desa Mandiri.

Desa Mandiri merupakan desa yang sudah mempunyai kemampuan untuk mengatur, mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya berdasarkan

kegiatan, kreativitas dan prakarsa sendiri, mampu mengelola administrasi pemerintahan desa dan pembangunan.

Standar minimal yang harus dipenuhi oleh suatu desa dikatakan Desa Mandiri antara lain adalah:

1. Terpenuhi Prasarana Dasar Pemerintahan Desa.
 - a. Memiliki kantor desa
 - b. Memiliki balai desa,
 - c. Memiliki kantor BPD dan LPM
2. Terpenuhi Pendidikan Wajar 9 tahun
 - a. Memiliki prasarana pendidikan SD/Sederajat.
 - b. Memiliki prasarana pendidikan SLTP/Sederajat
 - c. Penduduk tidak tamat SD < 10 %
3. Aspek Kesehatan.
 - a. Memiliki puskesmas/puskesmas pembantu dan tenaga para medis
 - b. Memiliki Pos Yandu dan aktif.
 - c. Kesehatan masyarakat baik.
4. Aspek Ekonomi
 - a. Memiliki pasar desa
 - b. Memiliki koperasi yang aktif
 - c. Memiliki BUMDes
 - d. Penduduk miskin < 10 %
5. Memiliki Listrik Desa.
6. Mempunyai Pendapatan Asli Desa.

7. Infrastruktur jalan, jembatan, jerambah, dermaga sudah terpenuhi minimal 90% dengan kondisi baik.
8. Aspek Pemerintahan Desa sudah berjalan dengan baik (Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Dalam Rangka Otonomi Menuju Desa Mandiri Tahun 2013: 9)

Untuk terwujudnya Desa yang Mandiri sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dengan Program Desa Mandiri, untuk suksesnya program ini tidak terlepas dari peranan Kepala Desa dalam menjalankan program yang telah di buat oleh Pemerintah Daerah, karena dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 14 tentang Tugas, Wewenang Kebijakan dan Hak Kepala Desa adalah sebagai berikut;

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang.
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan program ini berikut wawancara dengan Bupati Indragiri Hilir untuk tahap persiapan dan sosialisasi program Desa Mandiri dan Musdes Sosialisasi:

Tahap awal yang dilakukan seleksi desa merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam mempersiapkan pelaksanaan program desa mandiri. Proses seleksi dilakukan berdasarkan analisis desa dilakukan di tingkat kabupaten. Tujuan dilakukan seleksi desa adalah untuk mendapatkan daftar nama desa miskin sebagai calon penerima program desa mandiri. Sasaran pelaksanaan seleksi desa diarahkan kepada desa miskin yang memenuhi syarat yang ditetapkan bersama dan diutamakan desa yang belum pernah tersentuh proyek atau program pemerintah sebelumnya. Tahapan pelaksanaan seleksi desa tingkat kabupaten dimulai dengan pertemuan program desa mandiri di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh dinas terkait di tingkat kabupaten dan pemerintah daerah. Kegiatan dimulai dari pemetaan desa-desa miskin yang ada di kabupaten sesuai data sekunder yang diperoleh dari pemerintah daerah dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

Daftar desa miskin yang diperoleh dari pemerintah daerah setempat dengan kriteria desa miskin yang meliputi;

- a. Merupakan kriteria desa miskin dengan jumlah KK miskin sebesar 50%
- b. Mempunyai potensi (SDA dan SDM) mendukung program pembangunan Program Desa Mandiri
- c. Tingkat kesejahteraan dan pendapatan keluarga diukur dengan spesifik lokal.
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana (Bupati, Wawancara, Tanggal 05 November 2012)

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dijelaskan tentang Alokasi Dana Desa dalam pasal 1 pon (11) bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Dari peraturan ini sangat jelas bahwa Pemerintahan Desa tidak bisa melakukan pembangunan jika Desa tidak mendapat dana dari Pemerintahan Daerah atau melalui kebijakan pemerintah untuk membangun Desa, sebagaimana kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Indragiri Hilir dengan Program Desa Mandiri ini.

Selanjutnya merupakan tanggapan responden terhadap keterlibatan kepala desa pada program desa mandiri berdasarkan kuisisioner yang peneliti berikan pada responden. Dan responden menyatakan bahwa keterlibatan Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri dapat dilihat dari hasil angket yang peneliti berikan pada

responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 11 orang menjawab sangat baik atau 30%, dan respon yang menjawab baik peranan kepala desa 8 orang atau 22%, dan responden yang menjawab bahwa keterlibatan kepala dalam program desa mandiri cukup baik 11 orang atau 30% dari responden, dan responden yang menjawab kurang baik keterlibatan kepala desa 4 orang responden atau 11%, dan responden yang menjawab bahwa keterlibatan kepala desa tidak baik sebanyak 3 orang atau 8%.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bupati Indragiri Hilir tentang Program Desa Mandiri ini; “Program Desa Mandiri ini, merupakan sebuah kebijakan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di desa-desa yang selama ini pembangunannya belum berjalan secara maksimal, melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di desa tersebut dengan melibatkan secara langsung masyarakat setempat, tentunya dengan peran Kepala Desa yang lebih besar, karena Kepala Desa yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah untuk mensukseskan program ini”. (Bupati Indragiri Hilir, wawancara 06 Februari 2012)

Peneliti juga mewawancarai Ketua Bappeda mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program ini; “tentunya Kepala Desa merupakan orang yang berada pada garis depan dalam melakukan pelaksanaan Program Desa Mandiri, karena dia yang selalu berada pada lokasi dilaksanakan program ini, Kepala Desa memegang peranan penting sejak dimulainya program ini sampai program terelisasi dengan sempurna”. (Kepala Bappeda Indragiri Hilir, Wawancara, 5 Januari 2013)

Peneliti juga mewawancarai Ketua DPRD Indragiri Hilir tentang program ini; “ya. Dalam program ini DPRD hanya sebagai pengawas program, untuk pelaksana dilapangan tentunya Kepala Desa yang lebih mengetahui bagaimana kebutuhan masyarakat yang diterapkan program Desa Mandiri, DPRD sebagai pengawas program ini tidak banyak terlibat dalam pelaksanaan, namun terus memantau sejauhmana program ini dijalankan”. (Ketua DPRD Indragiri Hilir, Wawancara, 1 Februari 2013)

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “Ya, Kepala Desa merupakan ujung tombak dari kebijakan Program Desa Mandiri ini, karena Kepala Desa mengetahui kebutuhan masyarakatnya dan mereka juga yang mengajukan permohonan untuk program ini, sudah semestinya Kepala Desa memperhatikan pelaksanaan program desa mandiri ini secara maksimal dan tepat sasaran”. (Camat Mandah , Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; selama ini Kepala Desa dalam mengawasi pelaksanaan Program Desa Mandiri kurang maksimal, karena program ini tidak berjalan dengan baik, walaupun programnya selesai namun hasilnya kurang maksimal”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa program desa mandiri itu telah terlaksana, namun hasil dari program itu tidak maksimal dan terkesan dilaksanakan asal-asalan oleh pelaksana program, itu sesuai dengan hasil angket yang peneliti sebarakan kepada masyarakat, bahwa keterlibatan kepala desa dalam pelaksanaan Program Desa

Mandiri yang menjawab sangat baik dan yang menjawab baik dikumulatifkan maka akan mendapatkan jawaban 52% dari responden mengatakan bahwa keterlibatan kepala desa dalam program ini kurang baik, karena berada pada rentang persentase antara 56% - 65%.

Dan selanjutnya mengenai Visi dan Misi Kepala desa dalam melaksanakan Program Desa Mandiri, dapat dilihat Visi dan Misi Kepala desa dalam melaksanakan Program Desa Mandiri dapat dilihat dari hasil angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 17 orang menjawab sangat baik atau 46%, dan respon yang menjawab baik Visi dan Misi kepala desa 12 orang atau 32%, dan responden yang menjawab bahwa Visi dan Misi Kepala desa dalam melaksanakan Program Desa Mandiri cukup baik 4 orang atau 11% dari responden, dan responden yang menjawab kurang baik Visi dan Misi Kepala desa dalam melaksanakan Program Desa Mandiri adalah 3 orang responden atau 8%, dan responden yang menjawab bahwa Visi dan Misi Kepala desa dalam melaksanakan Program Desa Mandiri tidak baik sebanyak 1 orang atau 3%.

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “Ya, Kepala Desa tentunya memiliki visi dan misi dalam melaksanakan Program Desa Mandiri, karena tanpa visi dan misi yang jelas tentunya program ini tidak jelas kemana arahnya, secara umum visi dan misi kepala desa jelas tentu agar program ini terlaksana dengan maksimal dan berdaya guna bagi masyarakat setempat”.

(Camat Mandah , Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “ visi dan misi kepala desa dalam pelaksanaan program desa mandiri ini bagus, namun dalam implementasinya tidak sesuai dengan hasil dari program ini”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa visi dan misi yang diusung oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan program ini bagus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat dari hasil angket yang diberikan kepada masyarakat.

Visi dan Misi Kepala Desa dalam melaksanakan Program Desa Mandiri dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri jika diakumulasikan jawab sangat baik dengan jawaban baik maka 78%, dapat diketahui bahwa Visi dan Misi Kepala desa dalam melaksanakan Program Desa Mandiri baik karena berda pada persentase antara 66%-80%.

Selanjutnya Komitmen Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri, dapat kita lihat bahwa Komitmen Kepala Desa dalam pembangunan Desa dapat dilihat dari hasil angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 18 orang menjawab sangat baik atau 49%, dan resapon yang menjawab baik komitmen kepala Desa dalam pembangunan Desa 9 orang atau 24%, dan responden yang menjawab bahwa komitmen Kepala Desa dalam pembangunan Desa cukup baik 5 orang atau 14% dari responden, dan responden yang menjawab kurang baik komitmen Kepala Desa dalam pembangunan Desa adalah 4 orang responden atau 11%, dan responden yang menjawab bahwa

komitmen kepala Desa dalam pembangunan Desa tidak baik sebanyak 1 orang atau 3%.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bupati Indragiri Hilir tentang komitmen Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri ini; “ya, pelaksanaan program desa mandiri ini kepala desa sebagai orang yang terdepan dilapangan dalam melakukan pengawasan terhadap program ini tentunya memiliki komitmen yang kuat dan perencanaan yang matang, karena tanpa komitmen dalam melaksanakan program ini tidak ada artinya”. (Bupati Indragiri Hilir, wawancara 06 Februari 2012)

Peneliti juga mewawancarai Kepala Bappeda mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program ini; “program ini membutuhkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan program ini sudah tentu banyak sekali tantangan dan rintangannya dan diperlukan ketekunan dan kesabaran, karena program ini menyangkut dengan kehidupan masyarakat setempat”. (Ketua Bappeda Indragiri Hilir, Wawancara, 5 Januari 2013)

Peneliti juga mewawancarai Ketua DPRD Indragiri Hilir tentang program ini; “tentu ya, dalam melakukan setaip pekerjaan tentu ada komitmen yang mesti dijalankan, apalagi program ini menyangkut dengan hajat hidup masyarakat desa sudah tentu membutuhkan komitmen yang kuat dan selalu sabar dalam menghadapi masyarakat”. (Ketua DPRD Indragiri Hilir, Wawancara, 1 Februari 2013)

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “saya melihat setiap kepala desa memiliki komitmen yang kuat untuk program ini agar terlaksana dengan baik dan tepat pada sasarannya”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “secara komitmen kepala desa bagus, namun pada implementasinya kepala desa tidak memiliki wewenang yang penuh terhadap pelaksanaan program tersebut”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa komitmen kepala desa dalam melakukan atau melaksanakan program ini baik, namun kepala desa tidak memiliki wewenang penuh terhadap pelaksanaannya, itu sesuai dengan hasil angket yang peneliti sebarkan kepada masyarakat, diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen Kepala Desa dalam pembangunan Desa dengan Program Desa Mandiri jika jawaban sangat baik dan baik diakumulasikan maka 73% dari responden mengatakan bahwa Komitmen kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri baik, karena berada pada persentase antara 66%-80%.

Untuk selanjutnya terhadap keputusan dan arahan Kepala Desa, responden menjelaskan bahwa arahan kepala Desa dapat dilihat dari hasil angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 10 orang menjawab sangat baik atau 27%, dan resapon yang menjawab baik tanggapan responden terhadap keputusan dan arahan kepala Desa dalam

pembangunan Desa 6 orang atau 16%, dan responden yang menjawab bahwa tanggapan responden terhadap keputusan dan arahan kepala Desa cukup baik 10 orang atau 27% dari responden, dan responden yang menjawab kurang baik tanggapan responden terhadap keputusan dan arahan kepala Desa adalah 6 orang responden atau 16%, dan responden yang menjawab bahwa tanggapan responden terhadap keputusan dan arahan kepala Desa tidak baik sebanyak 5 orang atau 14%.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bupati Indragiri Hilir tentang komitmen Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri ini; “ya, kepala desa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan pengarahan terhadap pelaksanaan program desa mandiri ini, kepala desa jug memiliki hak untuk melakukan pengawasan penuh terhadap program ini, tujuannya agar program ini tepat sasaran dan mempunyai manfaat bagi masyarakat”. (Bupati Indragiri Hilir, wawancara 06 Februari 2012)

Peneliti juga mewawancarai Kepala Bappeda mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program ini; “Kepala Desa memiliki wewenang dalam mengambil keputusan dan memberikan arahan dalam pelaksanaan program desa mandiri, karena program ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan disana pula kepala desa memberikan arahan dan mengambail keputusannya”. (Kepala Bappeda Indragiri Hilir, Wawancara, 5 Januari 2013)

Peneliti juga mewawancarai Ketua DPRD Indragiri Hilir tentang program ini; “seorang pemimpin tentunya mempunyai hak dalam memberikan masukan dan membuat keputusan dalam suatu program, dalam hal ini tentunya kepala desa juga menerima masukan dari masyarakat setempat tentang apa yang mereka butuhkan dalam pembangun desa mereka”. (Ketua DPRD Indragiri Hilir, Wawancara, 1 Februari 2013)

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “kepala desa berwenang yang dalam mengambil keputusan dalam pembangunan desanya, terkait dengan program desa mandiri kepala desa juga memiliki hak untuk memutuskan tentang apa yang dibutuhkan desanya”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “seorang kepala pemerintah tentunya diharapkan suatu keputusan yang tepat dan arahan yang sifatnya bisa dilaksanakan oleh masyarakat, namun pada kenyataannya kepala desa tidak memberikan keputusan yang tepat dan arahnya kurang mengena pada program”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa kepala desa tidak memberikan keputusan yang tepat bagi terlaksanannya program desa mandiri dan juga arahan yang diberikan tidak tepat sasaran, itu sesuai dengan hasil angket yang peneliti sebarkan kepada masyarakat, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap keputusan dan arahan kepala Desa. Jika jawaban sangat baik dan baik diakumulasikan maka 43% dari responden mengatakan bahwa tanggapan responden terhadap keputusan dan arahan kepala Desa dalam melaksanakan Program Desa Mandiri kurang baik karena persentase kurang dari 41% - 55%.

Untuk selanjutnya keputusan Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri bahwa Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri dapat dilihat dari hasil angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 9 orang menjawab sangat baik atau 24%, dan respon yang menjawab baik keputusan Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri dalam pembangunan Desa 8 orang atau 22%, dan responden yang menjawab bahwa Keputusan Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri cukup baik 10 orang atau 27% dari responden, dan responden yang menjawab kurang baik Keputusan Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri adalah 6 orang responden atau 16%, dan responden yang menjawab bahwa keputusan Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri tidak baik sebanyak 4 orang atau 11%.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bupati Indragiri Hilir tentang komitmen Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri ini; “ya, kepala desa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan pengarahan terhadap pelaksanaan program desa mandiri ini, kepala desa jug memiliki hak untuk melakukan pengawan penuh terhadap program ini, tujuannya agar program

ini tepat sasaran dan mempunyai manfaat bagi masyarakat”. (Bupati Indragiri Hilir, wawancara 06 Februari 2012)

Peneliti juga mewawancarai Kepala Bappeda mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program ini; “dalam program ini kepala desa mempunyai hak untuk mengambil keputusan, karena program ini merupakan program langsung dan pelaksanaannya diserahkan kepada kepala desa”. (Kepala Bappeda Indragiri Hilir, Wawancara, 5 Januari 2013)

Peneliti juga mewawancarai Ketua DPRD Indragiri Hilir tentang program ini; “kepala desa memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam program ini dengan melibatkan semua komponen masyarakat setempat”. (Ketua DPRD Indragiri Hilir, Wawancara, 1 Februari 2013)

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “tentu ya, kepala desa mempunyai hak untuk memutuskan setiap program yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakatnya”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “dalam hal ini, kepala desa memiliki hak untuk memutuskan setiap program yang datang dari pemerintah, namun terkadang keputusan yang diambil oleh kepala desa tidak melibatkan masyarakat, namun hanya melibatkan orang-orang tertentu saja”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa kepala desa tidak melibatkan semua elemen masyarakat dalam melaksanakan program desa mandiri, dilapangan kepala desa hanya melibatkan sebagian kecil dari masyarakat dalam melaksanakan program ini, itu sesuai dengan hasil angket yang peneliti sebarakan kepada masyarakat, tanggapan responden terhadap keputusan kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri jika jawaban sangat baik dan baik diakumulasikan maka 46% dari responden mengatakan bahwa tanggapan responden terhadap keputusan dan arahan kepala Desa dalam melaksanakan Program Desa Mandiri kurang baik karena persentase kurang dari 41% - 55%.

Untuk selanjutnya keadilan Kepala Desa bagi masyarakatnya dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri Kepala Desa menurut masyarakat dapat dilihat dari hasil angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 8 orang menjawab sangat baik atau 22%, dan respon yang menjawab baik keadilan Kepala Desa bagi masyarakatnya dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri dalam pembangunan Desa 7 orang atau 19%, dan responden yang menjawab bahwa keadilan Kepala Desa bagi masyarakatnya dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri cukup baik 10 orang atau 27% dari responden, dan responden yang menjawab kurang baik keadilan Kepala Desa bagi masyarakatnya dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri adalah 6 orang responden atau 16%, dan responden yang menjawab bahwa keadilan Kepala Desa bagi masyarakatnya dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri tidak baik sebanyak 6 orang atau 16%.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bupati Indragiri Hilir tentang keadilan Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri ini; “ya, kepala desa mestinya harus adil dalam melakukan program ini dengan melibatkan semua elemen masyarakat desa tanpa memandang ras dan sukunya”. (Bupati Indragiri Hilir, wawancara 06 Februari 2012)

Peneliti juga mewawancarai Kepala Bappeda mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program ini; “seorang pemimpin mesti adil dalam setiap kebijakannya, dalam menjalankan program ini semestinya kepala desa harus melibatkan masyarakat dengan adil tanpa membedakan golongan dan sukunya”. (Kepala Bappeda Indragiri Hilir, Wawancara, 5 Januari 2013)

Peneliti juga mewawancarai Ketua DPRD Indragiri Hilir tentang program ini; “kepala desa dalam melaksanakan program ini mesti adil, karena program ini merupakan pemberdayaan masyarakat setempat dalam membangun desa mereka, pemerintah hanya mengucurkan dana dan masyarakat yang melakukan pembangunannya”. (Ketua DPRD Indragiri Hilir, Wawancara, 1 Februari 2013)

Wawancara peneliti dengan Camat tentang program ini; “dalam merialisasikan program yang sifatnya swadaya ini tentunya kepala desa harus berlaku adil dalam pelaksanaan programnya, karena tanpa keadilan program tidak berjalan dengan baik tentu ada saja hambatannya”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “semestinya kepala desa harus adil dalam pelaksanaan program desa mandiri dengan melibatkan

semua masyarakat yang ada, namun pada umumnya kepala desa hanya melibatkan orang-orang tertentu saja dalam pelaksanaan program ini". (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa kepala desa tidak adil dalam melaksanakan program desa mandiri karena hanya melibatkan orang-orang tertentu saja untuk melakukan program ini, itu sesuai dengan hasil angket yang peneliti sebarakan kepada masyarakat, bahwa keadilan Kepala Desa bagi masyarakatnya dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri, jika jawaban sangat baik dan baik diakumulasikan maka 41% dari responden mengatakan bahwa keadilan Kepala Desa bagi masyarakatnya dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri dalam melaksanakan Program Desa Mandiri kurang baik karena Persentase kurang dari 41% - 55%.

Untuk selanjutnya tentang peranan musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri, peranan musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa dapat dilihat dari hasil angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 7 orang menjawab sangat baik atau 19%, dan respon yang menjawab baik peranan musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri dalam pembangunan Desa 5 orang atau 14%, dan responden yang menjawab bahwa peranan musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri cukup baik 10 orang atau 27% dari responden, dan responden yang menjawab peranan musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri adalah 8 orang responden atau 22%,

dan responden yang menjawab bahwa peranan musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri tidak baik sebanyak 7 orang atau 19%.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bupati Indragiri Hilir tentang keadilan Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri ini; “dalam program desa mandiri ini mengutamakan hasil musyawarah antara kepala desa dengan masyarakat setempat untuk menentukan apa saja yang akan dibangun harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat”. (Bupati Indragiri Hilir, wawancara 06 Februari 2012)

Peneliti juga mewawancarai Kepala Bappeda mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program ini; “program ini diawali dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakatnya untuk menentukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan apa yang penting dibangun untuk desa tersebut”. (Kepala Bappeda Indragiri Hilir, Wawancara, 5 Januari 2013)

Peneliti juga mewawancarai Ketua DPRD Indragiri Hilir tentang program ini; “pelaksanaan program ini mesti didahului dengan melakukan musyawarah yang dipimpin oleh kepala desa guna menentukan kebutuhan masyarakat, setelah itu baru ditentukan apa yang paling prioritas”. (Ketua DPRD Indragiri Hilir, Wawancara, 1 Februari 2013)

Wawancara peneliti dengan Bapak Camat tentang program ini; “program ini terlebih dahulu dimulai dengan musyawarah dengan melibatkan semua masyarakat desa, jika kepala desa memutuskan sendiri nanti tidak tepat sasaran”. (Bapak Camat, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “musyarah dilakukan oleh kepala desa namun dalam mengambil keputusan tidak banyak memberikan masukan dan kepala desa mempunyai penilaian tersendiri terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa musyarah yang dipimpin oleh kepala desa dengan masyarakat tidak banyak memberikan masukan dan terkadang tidak menjadi prioritas oleh kepala desa, itu sesuai dengan hasil angket yang peneliti sebar kepada masyarakat, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa peranan musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri. Jika jawaban responden yang menjawab sangat baik dengan yang menjawab baik diakumulasikan maka 33% dari responden mengatakan bahwa peranan kepala Desa dalam musyawarah untuk pelaksanaan Program Desa Mandiri dalam melaksanakan Program Desa Mandiri tidak baik karena berada pada persentase kurang dari 0-40%.

Untuk selanjutnya pemahaman Masyarakat akan Program Desa Mandiri dapat dilihat dari hasil angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 5 orang menjawab sangat paham atau 14%, dan responden yang menjawab pemahaman Masyarakat terhadap Program Desa Mandiri dalam pembangunan desa yang paham 2 orang atau 5%, dan responden yang menjawab bahwa pemahaman Masyarakat terhadap Program Desa Mandiri cukup paham 15 orang atau 41% dari responden, dan responden

yang menjawab pemahaman Masyarakat terhadap Program Desa Mandiri kurang paham adalah 7 orang responden atau 19%, dan responden yang menjawab bahwa pemahaman Masyarakat terhadap Program Desa Mandiri tidak paham sebanyak 8 orang atau 22%.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bupati Indragiri Hilir tentang pemahaman masyarakat terhadap Desa Mandiri ini; “pemahaman masyarakat tentang program ini tentu masih kurang karena ini merupakan program baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan desa”. (Bupati Indragiri Hilir, wawancara 06 Februari 2012)

Peneliti juga mewawancarai Kepala Bappeda mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program ini; “program ini baru ya, secara umum masyarakat belum familiar dengan program ini, karena selama ini pembanguana selalu dilakukan oleh pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat setempat”. (Kepala Bappeda Indragiri Hilir, Wawancara, 5 Januari 2013)

Peneliti juga mewawancarai Ketua DPRD Indragiri Hilir tentang program ini; “pelaksanaan program ini secara umum masyarakat tidak mengetahuinya, karena selama ini pembangunan selalu dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat setempat, namun sekarang masyarakat dilibatkan dalam pembangunan ini”. (Ketua DPRD Indragiri Hilir, Wawancara, 1 Februari 2013)

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “program ini belum banyak masyarakat yang mengetahuinya, selama ini yang masyarakat ketahui pembanguana itu dilakukan oleh pemerintah, namun program ini

diharuskan masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan daerah mereka”.
(Camat Mandah , Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “ ya, masyarakat banyak tidak mengetahui pelaksanaan program ini, karena selama ini masyarakat tidak pernah terlibat dalam membangun desa mereka, dengan adanya program ini masyarakat harus terlibat langsung untuk membangun desa mereka”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa musyarah banyak yang tidak mengetahui pelaksanaan program ini, karena selama ini mereka tahu bahwa pem bangunan itu dilakukan oleh pemerintah dan mereka tidak dilibatkan seperti pada program desa mandiri ini. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bupati Indragiri Hilir tentang keadilan Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri ini; “dalam program desa mandiri ini mengutamakan hasil musyawarah antara kepala desa dengan masyarakat setempat untuk menentukan apa saja yang akan dibangun harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat”. (Bupati Indragiri Hilir, wawancara 06 Februari 2012)

Peneliti juga mewawancarai Kepala Bappeda mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program ini; “ program ini diawali dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakatnya untuk menentukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan apa yang penting dibangun untuk desa tersebut”. (Kepala Bappeda Indragiri Hilir, Wawancara, 5 Januari 2013)

Peneliti juga mewawancarai Ketua DPRD Indragiri Hilir tentang program ini; “ pelaksanaan program ini mesti didahului dengan melakukan musyarah yang dipimpin oleh kepala desa guna menentukan kebutuhan masyarakat, setelah itu baru ditentukan apa yang paling prioritas”. (Ketua DPRD Indragiri Hilir, Wawancara, 1 Februari 2013)

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “program ini terlebih dahulu dimulai dengan musyawarah dengan melibatkan semua masyarakat desa, jika kepala desa memutuskan sendiri nanti tidak tepat sasaran”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “musyarah dilakukan oleh kepala desa namun dalam mengambil keputusan tidak banyak memberikan masukan dan kepala desa mempunyai penilaian tersendiri terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa musyarah yang dipimpin oleh kepala desa dengan masyarakat tidak banyak memberikan masukan dan terkadang tidak menjadi prioritas oleh kepala desa, itu sesuai dengan hasil angket yang peneliti sebarakan kepada masyarakat, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman Masyarakat terhadap Program Desa Mandiri. Jika jawaban dari respondeng yang menjawab sangat paham dengan yang menjawab paham maka 19% dari responden mengatakan bahwa pemahaman

Masyarakat terhadap Program Desa Mandiri dalam melaksanakan Program Desa Mandiri tidak paham karena persentase kurang dari 0- 40%.

Selanjutnya pengetahuan pelaksana Program Desa Mandiri, dapat dilihat dari hasil angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 15 orang menjawab sangat paham atau 43 %, dan responden yang menjawab pemahaman Masyarakat terhadap Program Desa Mandiri dalam pembangunan desa yang paham 12 orang atau 34%, dan responden yang menjawab bahwa pemahaman Masyarakat terhadap Program Desa Mandiri cukup paham 5 orang atau 14% dari responden, dan responden yang menjawab pemahaman Masyarakat terhadap Program Desa Mandiri kurang paham adalah 2 orang responden atau 6%, dan responden yang menjawab bahwa pemahaman Masyarakat terhadap Program Desa Mandiri tidak paham sebanyak 1 orang atau 3%.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bupati Indragiri Hilir tentang pengetahuan masyarakat terhadap Desa Mandiri ini; “pelaksana program ini harus memiliki pengetahuan yang baik terhadap program ini, karena tanpa pengetahuan yang baik mereka tidak bisa untuk melaksanakan program dengan baik”. (Bupati Indragiri Hilir, wawancara 06 Februari 2012)

Peneliti juga mewawancarai Kepala Bappeda mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program ini; “program ini harus tepat sasaran tentu harus didukung dengan pengetahuan terhadap program desa mandiri ini”. (Kepala Bappeda Indragiri Hilir, Wawancara, 5 Januari 2013)

Peneliti juga mewawancarai Ketua DPRD Indragiri Hilir tentang program ini; “pelaksanaan program ini secara umum menuntut pelaksanaannya memiliki pengetahuan yang baik tentang program ini dan untuk apa dilakukan serta tepat sasaran”. (Ketua DPRD Indragiri Hilir, Wawancara, 1 Februari 2013)

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “program ini membutuhkan pengetahuan dalam melaksanakannya, karena melibatkan masyarakat setempat”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “ya, pengetahuan pelaksana program kurang memiliki pengetahuan dalam menjalankan program ini, karena banyak dari program ini tidak berjalan dengan baik baik dari segi mutu dan pengelolaannya”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa masyarakat banyak yang tidak mengetahui pelaksanaan program ini, karena selama ini mereka tahu bahwa pembangunan itu dilakukan oleh pemerintah dan mereka tidak dilibatkan seperti pada program desa mandiri ini. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman Masyarakat terhadap Program Desa Mandiri, karena responden yang menjawab sangat paham dan yang menjawab paham jika diakumulasikan maka 77% dari responden mengatakan bahwa pemahaman pelaksanaan terhadap Program Desa Mandiri dalam melaksanakan Program Desa Mandiri paham karena berada pada persentase antara 66% - 80%.

Selanjutnya kedisiplin dalam melaksanakan Program Desa Mandiri dapat dilihat dari hasil angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 14 orang menjawab sangat disiplin atau 38%, dan respon yang menjawab disiplin dalam melaksanakan Program Desa Mandiri dalam pembangunan desa 5 orang atau 14%, dan responden yang menjawab bahwa kadang-kadang disiplin dalam melaksanakan program Desa Mandiri dilakukan 10 orang atau 27% dari responden, dan responden yang menjawab kurang disiplin dalam melaksanakan Program Desa Mandiri dilakukan adalah 5 orang responden atau 14%, dan responden yang menjawab tidak disiplin dalam melaksanakan Program Desa Mandiri sebanyak 3 orang atau 8%.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bupati Indragiri Hilir tentang pemahaman masyarakat terhadap Desa Mandiri ini; “dalam setiap kegiatan atau menjalankan program tertentu harus memiliki disiplin dalam melaksanakan program ini, karena tanpa kedisiplinan program tersebut tidak akan berjalan dengan baik”. (Bupati Indragiri Hilir, wawancara 06 Februari 2012)

Peneliti juga mewawancarai Kepala Bappeda mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program ini; “kedisiplinan tentu sangat penting dalam menjalankan suatu program, karena tanpa disiplin program itu tidak akan berjalan dengan maksimal”. (Kepala Bappeda Indragiri Hilir, Wawancara, 5 Januari 2013)

Peneliti juga mewawancarai Ketua DPRD Indragiri Hilir tentang program ini; “disiplin itu penting dalam sebuah program apalagi sebagai pelaksana, tanpa disiplin program itu tidak akan berjalan dengan baik dan lancar”. (Ketua DPRD Indragiri Hilir, Wawancara, 1 Februari 2013)

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “disiplin itu penting, apalagi dalam sebuah program yang melibatkan masyarakat yang banyak dengan berbagai karakter untuk membangun seperti yang terdapat pada program desa mandiri”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “dalam pelaksanaan program ini pelaksana tidak memiliki disiplin yang bagus, karena pelaksana program terkesan bekerja apa adanya”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa pelaksana program tidak disiplin dalam melakukan program desa mandiri, karena selama ini mereka tahu bahwa pembangunan itu dilakukan oleh pemerintah dan mereka tidak dilibatkan seperti pada program desa mandiri ini. Dapat disimpulkan bahwa disiplin dalam melaksanakan Program Desa Mandiri. Jika responden yang menjawab sangat disiplin dan yang menjawab disiplin diakumulasikan maka 52% responden mengatakan bahwa Kedisiplin dalam melaksanakan Program Desa Mandiri selalu dilaksanakan karena berada pada persentase antara 41%-55% atau kurang disiplin dalam melaksanakan program Program Desa Mandiri.

Selanjutnya Program Desa Mandiri berpengaruh bagi masyarakat miskin di Desa Pulau Cawan, dapat dilihat dari hasil angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 16 orang menjawab

sangat berpengaruh atau 43%, dan respon yang menjawab berpengaruh Program Desa Mandiri berpengaruh bagi masyarakat miskin di Desa Pulau Cawan dalam pembangunan desa 4 orang atau 11%, dan responden yang menjawab bahwa Program Desa Mandiri berpengaruh bagi masyarakat miskin di Desa Pulau Cawan cukup berpengaruh 9 orang atau 24% dari responden, dan responden yang menjawab Program Desa Mandiri berpengaruh bagi masyarakat miskin di Desa Pulau Cawan kurang berpengaruh adalah 5 orang responden atau 14%, dan responden yang menjawab Program Desa Mandiri berpengaruh bagi masyarakat miskin di Desa Pulau Cawan tidak berpengaruh sebanyak 3 orang atau 8%.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bupati Indragiri Hilir tentang manfaat bagi masyarakat terhadap program Desa Mandiri ini; “dalam perancangan program ini agar semua masyarakat merasakan manfaat dari program ini mulai dari masyarakat miskin sampai yang kaya”. (Bupati Indragiri Hilir, wawancara 06 Februari 2012)

Peneliti juga mewawancarai Kepala Bappeda mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program ini; “program ini gunanya untuk seluruh masyarakat desa tersebut, diharapkan semua masyarakat mendapatkan manfaat dari program ini”. (Kepala Bappeda Indragiri Hilir, Wawancara, 5 Januari 2013)

Peneliti juga mewawancarai Ketua DPRD Indragiri Hilir tentang program ini; “dari program ini diharapkan semua lapisan masyarakat mengambil manfaat dari program ini”. (Ketua DPRD Indragiri Hilir, Wawancara, 1 Februari 2013)

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “jelas ya, jika program ini terlaksana dengan baik dan tepat sasaran tentu memberikan

manfaat bagi masyarakat didesa setempat”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “program ini juga tidak mempengaruhi terhadap masyarakat miskin”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa pelaksana program tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat miskin didesa tersebut, karena selama ini mereka tahu bahwa pembangunan itu dilakukan oleh pemerintah dan mereka tidak dilibatkan seperti pada Program Desa Mandiri ini. Dapat disimpulkan bahwa Program Desa Mandiri berpengaruh bagi masyarakat miskin di Desa Pulau Cawan. Jika jawaban sangat berpengaruh dan jawaban yang berpengaruh diakumulasikan 53% dari responden mengatakan bahwa Program Desa Mandiri kurang berpengaruh bagi masyarakat miskin di Desa Pulau Cawan karena berada pada persentase kurang dari 41% - 55%.

Ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Pulau Cawan, dapat dilihat dari hasil angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden yang menjawab bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Pulau Cawan sangat memadai 1 orang atau 3% dari responden, dan responden yang menjawab ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Pulau Cawan kurang memadai adalah 30 orang responden atau 81%, dan responden yang menjawab

ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Pulau Cawan tidak memadai sebanyak 6 orang atau 16%.

Wawancara peneliti dengan Bapak Camat tentang program ini; “ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Pulau Cawan sangat kurang sekali, dengan adanya program ini diharapkan ada peningkatannya”. (Bapak Camat, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “sarana dan prasarana di Desa Pulau Cawan sangat jauh tertinggal dengan desa-desa lainnya, prasarana di desa ini tidak memadai”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa prasarana di Desa Pulau Cawan tidak memadai dan banyak yang tidak layak dipakai, pembangunan Desa Pulau Cawan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan desa-desa yang lain, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Pulau Cawan, jika jawaban kurang memadai dan jawaban tidak memadai diakumulasikan maka 97% dari responden mengatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Pulau Cawan kurang baik.

Pemerintah selalu mensosialisasikan Program Desa Mandiri, dapat dilihat dari hasil angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 19 orang menjawab selalu atau 51%, dan respon yang menjawab sering pemerintah selalu mensosialisasikan Program Desa Mandiri dalam pembangunan desa 7 orang atau 19%, dan responden yang menjawab bahwa pemerintah selalu mensosialisasikan Program Desa Mandiri kadang-

kadang 4 orang atau 11% dari responden, dan responden yang menjawab pemerintah selalu mensosialisasikan Program Desa Mandiri jarang adalah 4 orang responden atau 11%, dan responden yang menjawab pemerintah selalu mensosialisasikan Program Desa Mandiri tidak pernah sebanyak 3 orang atau 8%.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bupati Indragiri Hilir tentang pemahaman masyarakat terhadap Desa Mandiri ini; “program ini selalu disosialisasikan kepada setiap kepala desa dan camat di Kabupaten Indragiri Hilir ini, agar mereka memberikan pemahaman pada masyarakat di setiap desa dan kecamatan”. (Bupati Indragiri Hilir, wawancara 06 Februari 2012)

Peneliti juga mewawancarai Kepala Bappeda mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program ini; “setiap program tentu ada sosialisasinya kepada masyarakat karena tanpa sosialisasi program itu tidak akan berjalan”. (Kepala Bappeda Indragiri Hilir, Wawancara, 5 Januari 2013)

Peneliti juga mewawancarai Ketua DPRD Indragiri Hilir tentang program ini; “sosialisasi program itu perlu sekali, tanpa sosialisasi program tidak berjalan dengan baik dan terkadang tidak tepat sasaran”. (Ketua DPRD Indragiri Hilir, Wawancara, 1 Februari 2013)

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “kami selalu mensosialisasikan setiap program yang disampaikan oleh Bupati kepada masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembanguna baik dikecamatan dan desa”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “sosialisasi itu penting, masyarakat tidak akan tahu manfaat dari program itu, kepala desa juga melakukan sosialisasi terhadap program ini tujuannya dan manfaatnya bagi masyarakat”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa kepala desa mensosialisasikan program desa mandiri kepada masyarakatnya, dapat disimpulkan bahwa pemerintah selalu mensosialisasikan Program Desa Mandiri, jika jawaban sering dan jawaban selalu diakumulasikan maka 70% dari responden mengatakan bahwa pemerintah mensosialisasikan Program Desa Mandiri karena berada pada persentase antara 66% - 80%.

Peranan perangkat desa dalam mensukseskan Program Desa Mandiri, dapat dilihat dari hasil angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 13 orang menjawab sangat baik atau 35%, dan responden yang menjawab baik peranan perangkat desa dalam mensukseskan Program Desa Mandiri 7 orang atau 24%, dan responden yang menjawab bahwa peranan perangkat desa dalam mensukseskan Program Desa Mandiri cukup baik 9 orang atau 11% dari responden, dan responden yang menjawab peranan perangkat desa dalam mensukseskan Program Desa Mandiri kurang baik adalah 5 orang responden atau 14%, dan responden yang menjawab peranan perangkat desa dalam mensukseskan Program Desa Mandiri tidak baik sebanyak 3 orang atau 8%.

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini: “perangkat desa tentu memiliki peranan yang penting dalam menyukseskan program ini, karena mereka merupakan bagian dari program ini”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “perangkat desa mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program ini mestinya, namun pada kenyataannya mereka tidak banyak terlibat pada program ini”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa perangkat desa tidak banyak terlibat pada pelaksanaan program ini, disimpulkan bahwa peranan perangkat desa dalam mensukseskan Program Desa Mandiri, jika jawaban responden yang menjawab sangat baik dan jawaban responden yang baik diakumulasikan maka 54% dari responden mengatakan bahwa peranan perangkat desa dalam mensukseskan Program Desa Mandiri kurang baik karena berada pada persentase kurang dari 41% - 55%.

Program Desa Mandiri menjadi program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dari hasil angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 15 orang menjawab sangat setuju atau 41%, dan respon yang menjawab setuju Program Desa Mandiri menjadi program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan Desa Pulau Cawan 5 orang atau 14%, dan responden yang menjawab bahwa Program Desa Mandiri

menjadi program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan cukup setuju 9 orang atau 24% dari responden, dan responden yang menjawab Program PNPM Mandiri Perdesaan menjadi program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan kurang setuju adalah 5 orang responden atau 14%, dan responden yang menjawab Program Desa Mandiri menjadi program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tidak setuju sebanyak 3 orang atau 8%.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bupati Indragiri Hilir tentang pemahaman masyarakat terhadap Desa Mandiri ini; “program ini tujuannya untuk menuntaskan kemiskinan dan meratakan pembangun di Kabupaten Indragiri Hilir”. (Bupati Indragiri Hilir, wawancara 06 Februari 2012)

Peneliti juga mewawancarai Kepala Bappeda mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program ini; “program ini tujuan membuka akses dan membangun sarana dan prasarana di desa, dengan adanya program ini diharapkan dapat menuntaskan kemiskinan”. (Kepala Bappeda Indragiri Hilir, Wawancara, 5 Januari 2013)

Peneliti juga mewawancarai Ketua DPRD Indragiri Hilir tentang program ini; “program ini untuk membuka isolasi pembangunan selama ini, karena pembangunan disetiap desa tidak merata dengan adanya program ini bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menuntaskan kemiskinan”. (Ketua DPRD Indragiri Hilir, Wawancara, 1 Februari 2013)

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “program ini sangat penting untuk meningkatkan pembangunan dan menuntaskan kemiskinan”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa program ini untuk menuntaskan kemiskinan di desa dan membuka akses pembangunan, dapat disimpulkan bahwa Program Desa Mandiri menjadi program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, jika jawaban responden yang menjawab sangat setuju dan yang menjawab setuju diakumulasikan maka 56% dari responden mengatakan bahwa Program Desa Mandiri menjadi program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan cukup setuju karena berada pada persentase antara 56% - 65%.

Kegiatan Program Desa Mandiri sesuai dengan rencana, dapat dilihat dari hasil angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 9 orang menjawab sangat setuju atau 24%, dan respon yang menjawab setuju kegiatan Program Desa Mandiri sesuai dengan rencana 8 orang atau 22%, dan responden yang menjawab bahwa Program Desa Mandiri sesuai dengan rencana cukup setuju 10 orang atau 27% dari responden, dan responden yang menjawab Program Desa Mandiri sesuai dengan rencana kurang setuju adalah 5 orang responden atau 14%, dan responden yang menjawab Program Desa Mandiri sesuai dengan rencana tidak setuju sebanyak 5 orang atau 14%.

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “pelaksanaan program ini terkadang tidak tepat sasaran dan terkadang tidak sesuai dengan rencana awalnya”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “program desa mandiri ini pada pelaksanaan banyak yang tidak sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan sebelum pelaksanaan program”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan program desa mandiri tidak sesuai dengan rencana, Kegiatan Program Desa Mandiri sesuai dengan rencana, jika jawaban responden yang sangat setuju dan yang menjawab setuju diakumulasikan maka 46% dari responden mengatakan bahwa Kegiatan Desa Mandiri Perdesaan kurang sesuai karena berada pada persentase kurang dari 41% - 55%.

Masyarakat setuju dengan ada program Desa Mandiri dapat dilihat dari hasil angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 25 orang menjawab sangat setuju atau 68%, dan respon yang menjawab setuju masyarakat setuju dengan ada program Program Desa Mandiri 37 orang atau 19%, dan responden yang menjawab bahwa masyarakat setuju dengan ada program Desa Mandiri cukup setuju 5 orang atau 14% dari responden.

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “masyarakat sangat setuju dengan program ini karena pada program ini memberi manfaat bagi masyarakat desa, dengan program masyarakat merasakan manfaatnya, terlepas dari berbagai kekurangan terhadap pelaksanaannya didesa”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “program ini mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat karena melalui program ini

pembangunan didesa mereka akan semakin maju”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa masyarakat sangat setuju dengan adanya program ini karena dengan program ini akan meningkatkan pembanguna sarana dan prasarana di desa mereka, masyarakat setuju dengan ada Program Desa Mandiri, jika jawaban responden yang menjawab sangat setuju dan jawaban responden yang setuju maka 87% dari responden mengatakan bahwa sangat setuju dengan ada Program Desa Mandiri karena berada pada persentase antara 81% - 100%.

Hasil telaahan dari jawaban responden tersebut dapat dilihat secara keseluruhan sikap Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri ini cukup baik karena ada beberapa pertanyaan dari angket yang diberikan pada responden yang dijawab kurang baik, karena kurang partisipasi kepala desa dalam pelaksanaan program ini yang dilihat oleh masyarakat Desa Pulau Cawan.

Teori Public Policy Implementation yang dikembangkan oleh Grindle (1980: 7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di

dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik.

Selanjutnya Grindle juga menjelaskan bahwa lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Kepala Desa sebagai perpanjangan tangan Pemerintah di Desa diharapkan berperan aktif dalam menyukseskan Program Desa Mandiri ini agar masyarakat Desa Pulau Cawan dapat merasakan manfaat yang besar dari Program ini, karena lingkungan dimana program ini dilaksanakan tentunya kepala desa yang lebih banyak mengetahuinya.

2. Lingkungan, Sosial, Budaya Mempengaruhi Pelaksanaan Program Desa Mandiri

Dalam mengimplematasikan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten tentunya akan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pemerintah Daerah tidak akan terlepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 88 ayat 1 sampai 4 serta poin a sampai e berikut ini;

- 1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD.
- 2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kepentingan masyarakat desa melalui keikutsertaan masyarakat;
 - b. kewenangan desa;
 - c. kelancaran pelaksanaan investasi;
 - d. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Kebijakan program Desa Mandiri sudah tepat untuk pembangunan desa, bahwa kebijakan Program Desa Mandiri sangat tepat untuk pembangunan desa dapat dilihat dari hasil angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 14 orang menjawab sangat tepat atau 38%, dan respon yang menjawab tepat kebijakan Program Desa Mandiri sudah tepat untuk pembangunan desa 5 orang atau 14%, dan responden yang menjawab

bahwa kebijakan Program Desa Mandiri sudah tepat untuk pembangunan desa cukup tepat 10 orang atau 27% dari responden, dan responden yang menjawab bahwa kebijakan Program Desa Mandiri sudah tepat untuk pembangunan desa kurang tepat 5 atau 14%, dan responden yang menjawab bahwa kebijakan Program Desa Mandiri sudah tepat untuk pembangunan desa tidak tepat 3 orang atau 8%.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bupati Indragiri Hilir tentang pemahaman masyarakat terhadap Desa Mandiri ini; “program ini merupakan program untuk membangun desa dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sara prasarana didesa”. (Bupati Indragiri Hilir, wawancara 06 Februari 2012)

Peneliti juga mewawancarai Kepala Bappeda mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program ini; “harapan dengan adanya program ini diharapkan dapat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan didesa-desa”. (Kepala Bappeda Indragiri Hilir, Wawancara, 5 Januari 2013)

Peneliti juga mewawancarai Ketua DPRD Indragiri Hilir tentang program ini; “program ini dibuat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan didesa-desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir”. (Ketua DPRD Indragiri Hilir, Wawancara, 1 Februari 2013)

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “program ini menurut sebagai masyarakat kurang tepat untuk mengentaskan kemiskinan”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa program tidak untuk membangun desa, karena responden yang menjawab sudah tepat dan responden yang menjawab tepat diakumulasikan maka 52% dari responden mengatakan bahwa dan responden yang menjawab bahwa kebijakan Program Desa Mandiri kurang tepat karena berada pada persentase kurang dari 41% - 55%.

Peningkatan kinerja Program Desa Mandiri untuk pembangunan desa dapat dilihat dari hasil angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 15 orang menjawab sangat yakin atau 41%, dan respon yang menjawab yakin peningkatan kinerja Program Desa Mandiri untuk pembangunan desa 5 orang atau 14%, dan responden yang menjawab bahwa peningkatan kinerja Program Desa Mandiri untuk pembangunan desa cukup yakin karena 9 orang atau 24% dari responden, dan responden yang menjawab bahwa peningkatan kinerja Program Desa Mandiri untuk pembangunan desa kurang yakin karena 5 atau 14%, dan responden yang menjawab bahwa peningkatan kinerja Program Desa Mandiri untuk pembangunan desa tidak yakin karena 3 orang atau 8%.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bupati Indragiri Hilir tentang peningkatan kinerja Program Desa Mandiri; “kinerja pelaksana program ini yang masih kurang, oleh karena itu perlu peningkatan kinerja bagi pelaksana program ini”. (Bupati Indragiri Hilir, wawancara 06 Februari 2012)

Peneliti juga mewawancarai Kepala Bappeda mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program ini; “dalam setiap program selalu terjadi

persoalan kinerja pelaksanaannya dilapangan yang selalu lalai dalam menjalankan tugas mereka”. (Kepala Bappeda Indragiri Hilir, Wawancara, 5 Januari 2013)

Peneliti juga mewawancarai Ketua DPRD Indragiri Hilir tentang program ini; “program ini diperlukan kinerja yang baik dan kerjasama yang pula, karena tanpa kinerja yang baik dan kerjasama yang baik program ini tidak akan sukses dan sampai pada tujuannya”. (Ketua DPRD Indragiri Hilir, Wawancara, 1 Februari 2013)

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “kalau diamati kinerja pelaksana program memang masih belum maksimal dalam menjalankan program ini”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “kinerja pelaksana program belum maksimal, karena dilapangan banyak sekali kesalahan-kesalahan oleh pelaksana program”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa kinerja pelaksana program tidak bagus, ini dapat dilihat pada tabel di atas.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab peningkatan kinerja Program Desa Mandiri, jika jawaban responden yang menjawab sangat yakin dan responden yang jawab demikian itu sebanyak 55% dari responden mengatakan bahwa peningkatan kinerjanya kurang baik karena berada pada persentase kurang dari 41% - 55%.

Pelaksanaan Program Desa Mandiri menimbulkan permasalahan, dapat dilihat dari angket peneliti yang berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 1 orang menjawab kurang setuju atau 3%, dan resapon yang menjawab tidak setuju pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan menimbulkan permasalahan 36 orang atau 97%,

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bupati Indragiri Hilir tentang peningkatan kinerja PNPM Desa Mandiri; “program ini dilaksanakan tidak untuk mendatangkan masalah bagi masyarakat setempat, tujuan dari program ini untuk memudahkan masyarakat setempat”. (Bupati Indragiri Hilir, wawancara 06 Februari 2012)

Peneliti juga mewawancarai Kepala Bappeda mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program ini; “program ini digagas untuk memberikan kemudahan dan membangun desa, program ini untuk kemajuan masyarakat bukan untuk menjadi masalah di masyarakat”. (Kepala Bappeda Indragiri Hilir, Wawancara, 5 Januari 2013)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “secara umum program ini tidak menimbulkan masalah dimasyarakat, dan masyarakat menerima program ini dengan baik”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa masyarakat menerima program ini dengan baik, dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab tidak setuju dan jawaban kurang setuju

diakumulasikan maka 100% dari responden mengatakan bahwa pelaksanaan Program Desa Mandiri tidak menimbulkan permasalahan.

Sosial ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan mempengaruhi berpartisipasi mereka dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri, dapat lihat bahwa sosial mempengaruhi pelaksanaan Program Desa Mandiri dalam pembangunan desa dari angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 17 orang menjawab keadaan sosial masyarakat sangat mempengaruhi atau 46%, dan respon yang menjawab keadaan sosial mempengaruhi pelaksanaan Program Desa Mandiri dalam pembangunan desa 5 orang atau 14%, dan responden yang menjawab bahwa keadaan sosial cukup mempengaruhi pelaksanaan Program Desa Mandiri dalam pembangunan desa sebanyak 7 orang atau 19% dari responden, dan responden yang menjawab keadaan sosial masyarakat kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan Program Desa Mandiri sebanyak 5 atau 14%, dan responden yang menjawab bahwa keadaan sosial masyarakat tidak mempengaruhi pelaksanaan Program Desa Mandiri sebanyak 3 orang atau 8%.

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “keadaan sosial masyarakat mempengaruhi program ini, karena keadaan sosial mempengaruhi pelaksanaan program desa mandiri ini”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “program ini mempengaruhi kehidupan sosial, karena masyarakat pada umumnya bekerja dan

mereka tidak banyak membantu dalam pelaksanaan program”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa program ini cukup mempengaruhi sosial masyarakat, ini dapat dilihat pada tabel di atas.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan Program Desa Mandiri, jika jawaban responden yang menjawab sangat mempengaruhi dan jawaban responden yang menjawab mempengaruhi diakumulasikan maka 60% dari responden mengatakan bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan Berpengaruh terhadap partisipasi mereka dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri cukup berpengaruh karena berada pada rentang persentase antara 56% - 65%.

Budaya kerja masyarakat Desa Pulau Cawan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan Program Desa Mandiri, dapat dilihat dari angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 19 orang menjawab bahwa budaya kerja masyarakat sangat mempengaruhi atau 51%, dan resapon yang menjawab budaya kerja masyarakat mempengaruhi pelaksanaan Program Desa Mandiri 1 orang atau 3%, dan responden yang menjawab bahwa budaya kerja masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan Program Desa Mandiri karena 8 orang atau 22% dari responden, dan responden yang menjawab bahwa budaya kerja masyarakat kurang mempengaruhi pelaksanaan Program Desa Mandiri karena 6 atau 16%, dan responden yang

menjawab bahwa budaya kerja masyarakat tidak mempengaruhi pelaksanaan Program Desa Mandiri karena 3 orang atau 8%.

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “keadaan budaya kerja masyarakat mempengaruhi program ini, karena masyarakat pada umum nelayan dan bertani tentu mempengaruhi pelaksanaan program desa mandiri ini”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “budaya kerja masyarakat tidak mempengaruhi program desa mandiri karena masyarakat pada umumnya nelayan dan petani, karena masyarakat pada umumnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa budaya kerja masyarakat tidak mempengaruhi pelaksanaan program ini cukup mempengaruhi sosial masyarakat.

Sosial masyarakat sangat berpengaruh dan jawaban responden yang menjawab berpengaruh diakumulasikan maka 54% dari responden mengatakan bahwa budaya kerja masyarakat Desa Pulau Cawan dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri, karena berada pada rentang Persentase 41% - 55% dikatakan budaya kerja masyarakat Desa Pulau Cawan kurang berpengaruh terhadap pelaksanaannya.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pulau Cawan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan Program Desa Mandiri dapat dilihat dari angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 20

orang menjawab bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi k atau 54%, dan resapon yang menjawab bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi pelaksanaan Program Desa Mandiri 7 orang atau 19%, dan responden yang menjawab bahwa tingkat pendidikan cukup mempengaruhi pelaksanaan Program Desa Mandiri karena 7 orang atau 19% dari responden, dan responden yang menjawab bahwa tingkat pendidikan kurang mempengaruhi pelaksanaan Program Desa Mandiri karena 2 atau 5%, dan responden yang menjawab bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi pelaksanaan Program Desa Mandiri tidak baik 1 orang atau 3%.

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “keadaan pendidikan masyarakat mempengaruhi program ini, karena pendidikan masyarakat pada umumnya berada pada tingkat SD hingga tamatan SMA”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi program desa mandiri karena masyarakat pada umumnya hanya tamatan SD sampai SMA dan ada yang tidak tamad SD, karena masyarakat pada umumnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pelaksanaan program ini cukup berpengaruh sosial masyarakat, ini dapat dilihat pada tabel di atas.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pelaksanaan Program Desa Mandiri, jika jawaban responden yang menjawab sangat mempengaruhi dan jawaban responden yang menjawab berpengaruh diakumulasikan maka 73% dari responden mengatakan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi pelaksanaan Program Desa Mandiri karena berada pada rentang persentase antara 66%-80%, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pelaksanaan Program Desa Mandiri di Pulau Cawan.

Untuk selanjutnya sikap dari responden terhadap ketercapaian program-Program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan, dapat dilihat dari angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 8 orang menjawab sangat baik atau 22%, dan respon yang menjawab baik program-program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan telah terlaksana dengan baik 3 orang atau 8%, dan responden yang menjawab bahwa program-program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan telah terlaksana dengan cukup baik 14 orang atau 38% dari responden, dan responden yang menjawab bahwa program-program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan telah terlaksana kurang baik 7 atau 19%, dan responden yang menjawab bahwa program-program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan telah terlaksana dengan tidak baik 5 orang atau 14%.

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “masyarakat menilai program ini tidak terlaksana dengan baik oleh pelaksana program desa mandiri”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Kuetua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “masyarakat

mempunyai penilaian sendiri terhadap hasil dari program desa mandiri ini, masyarakat menialia program tidak terlaksana dengan baik". (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan program tidak terlaksan dengan baik, jika menjawab sangat baik dan baik diakumulasikan maka 30% dari Sikap dari Responden Terhadap Ketercapaian Program-program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan berada pada rentang persentase kurang dari 0-40%. Artinya ketercapaian Program Desa Mandiri kurang baik.

Keadaan Alam Desa Pulau Cawan yang berbatu dan berpasir serta berawa bisa mempengaruhi pelaksanaan program-program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan, dapat dilihat dari angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 15 orang menjawab bahwa keadaan alam sangat mempengaruhi program-program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan atau 41%, dan resapon yang menjawab bahwa keadaan alam mempengaruhi program-program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan karena 5 orang atau 14%, dan responden yang menjawab bahwa keadaan alam cukup mempengaruhi program-program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan karena 9 orang atau 24% dari responden, dan responden yang menjawab bahwa keadaan alam kurang mempengaruhi program-program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan karena 5 atau 14%, dan responden yang menjawab bahwa keadaan alam tidak mempengaruhi program-program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan karena 3 orang atau 8%.

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “keadaan alam Desa Pulau Cawan tidak mempengaruhi pelaksanaan program desa mandiri, kultur desa yang bergambut dan rawa-rawa kurang mempengaruhi program ini”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “keadaan alam desa pulau cawan yang bergambut berawa-rawa kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan program desa mandiri”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan program desa mandiri tetap terlaksana walaupun keadaan alam berawah dan gambut itu tidak mempengaruhi terlaksananya program ini, karena keadaan alam berbatu dan berpasir serta berawa kurang mempengaruhi program-program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan, jika jawaban responden yang menjawab sangat mempengaruhi dan mempengaruhi diakumulasikan maka 55% dari responden mengatakan bahwa keadaan alam kurang mempengaruhi program-program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan.

Program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan memberikan manfaat bagi masyarakat, dari angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 18 orang menjawab sangat bermanfaat atau 49%, dan respon yang menjawab bermanfaat Program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan memberikan manfaat bagi masyarakat karena 12 orang atau 32%, dan responden yang menjawab bahwa Program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan cukup

memberikan manfaat bagi masyarakat cukup baik 7 orang atau 19% dari responden.

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “dari segi manfaat, banyak sekali manfaat dari program ini, karena program ini ditujukan untuk membuka jalan dan membuat dermaga ini sangat menguntungkan bagi masyarakat”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “hasil dari program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, program ini ditujukan untuk membangun jalan dermaga ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa program ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Pulau Cawan karena programnya untuk pembangunan jalan dan dermaga ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat.

Program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan, jika jawaban responden yang menjawab sangat memberikan manfaat dan responden yang menjawab bermanfaat masyarakat diakumulasikan maka 81% dari responden mengatakan bahwa program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan sangat memberikan manfaat bagi masyarakat misalnya dalam pembangunan sarana air bersih akan meningkatkan kesehatan masyarakat Desa Pulau Cawan dan memenuhi kebutuhan air mereka, semenisasi jalan, pembangunan dermaga, ini semua meningkatkan kemampuan

masyarakat dalam mobilisasi barang dengan adanya dermaga dan semenisasi jalan, karena berada pada persentase antara 81% - 100%.

Manfaat dari Program Desa Mandiri ini dapat dirasakan baik secara kelompok maupun pribadi serta individu yang ada di Desa Pulau Cawan, karena Program Desa Mandiri ini dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Pulau Cawan yang membutuhkan infrastruktur di Desa mereka, masyarakat merasakan sekali manfaat dari program ini (Andnan, tokoh Masyarakat Desa Pulau Cawan, Wawancara, Tanggal 14 Desember 2012)

Program Desa Mandiri ini ada pengaruhnya bagi kehidupan sosial masyarakat Desa Pulau Cawan, sangat mempengaruhi bagi kehidupan sosial individu, keluarga, dan masyarakat Desa Pulau Cawan dapat dilihat dari angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 18 orang menjawab Program Desa Mandiri ini sangat mempengaruhi bagi kehidupan sosial individu, keluarga, dan masyarakat Desa Pulau Cawan atau 49%, dan respon yang menjawab bahwa Program Desa Mandiri ini mempengaruhi bagi kehidupan sosial individu, keluarga, dan masyarakat Desa Pulau Cawan karena 12 orang atau 32%, dan responden yang menjawab bahwa Program Desa Mandiri ini cukup mempengaruhi kehidupan sosial individu, keluarga, dan masyarakat Desa Pulau Cawan karena 7 orang atau 19% dari responden.

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “dari segi manfaat, banyak sekali manfaat dari program ini bagi kehidupan sosial individu, keluarga, dan masyarakat Desa Pulau Cawan bagi kehidupan sosial individu,

keluarga, dan masyarakat Desa Pulau Cawan”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “hasil dari program ini sangat bermanfaat bagi bagi kehidupan sosial individu, keluarga, dan masyarakat Desa Pulau Cawan”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa program ini bermanfaat bagi kehidupan sosial individu, keluarga, dan masyarakat Desa Pulau Cawan.

Program Desa Mandiri ini sangat mempengaruhi bagi kehidupan sosial individu, keluarga, dan masyarakat Desa Pulau Cawan, jika jawaban responden yang menjawab sangat mempengaruhi dan jawaban mempengaruhi diakumulasikan maka 81% dari responden mengatakan bahwa sosial individu, keluarga, dan masyarakat Desa Pulau Cawan, mempengaruhi program-program dari pemerintah, karena kehidupan sosial individu, keluarga, dan masyarakat inilah yang sangat mempengaruhi pelaksanaan program Desa Mandiri karena berada pada rentang Persentase antara 81% - 100%.

Program Desa Mandiri ini ada pengaruhnya bagi ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan sangat berpengaruh bagi ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan dari angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 20 orang menjawab Program Desa Mandiri ini sangat berpengaruh bagi ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan atau 54%, dan respon yang menjawab bahwa Program Desa Mandiri ini ada pengaruhnya bagi ekonomi

masyarakat Desa Pulau Cawan karena 12 orang atau 32%, dan responden yang menjawab bahwa Program Desa Mandiri ini cukup berpengaruh bagi ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan karena 7 orang atau 19% dari responden.

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “program ini ada pengaruhnya bagi ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “program desa ada pengaruhnya bagi ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa ada pengaruhnya bagi ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan, dapat dilihat pada tabel di atas.

Program Desa Mandiri ini sangat berpengaruh bagi ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan, jika responden yang menjawab sangat berpengaruh dan jawaban responden yang menjawab berpengaruh diakumulasikan maka 86% dari responden mengatakan bahwa Program Desa Mandiri ini sangat berpengaruh bagi ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan karena berada pada rentang Persentase antara 81%-100%. Diaman dengan adanya program ini untuk membangun jalan dan dermaga serta jembatan akan memperlancar arus barang dan mempermudah mobilisasi hasil pertanian yang ada di Desa Pulau Cawan untuk dibawa keluar dan begitu juga barang yang masuk. Program ini secara ekonomi memberikan

kemudahan bagi masyarakat untuk memperlancar arus barang dari dalam Desa Pulau Cawan maupun dari luar menuju Pulau Cawan.

Program Desa Mandiri ini pengaruhnya bagi akses ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan. Pengaruhnya bagi akses ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan dapat dilihat dari angket yang peneliti berikan pada responden yang berjumlah 37 orang. Dari 37 responden 19 orang menjawab Program Desa Mandiri ini sangat berpengaruh bagi akses ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan atau 51%, dan respon yang menjawab bahwa Program Desa Mandiri ini berpengaruh bagi akses ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan karena 11 orang atau 30%, dan responden yang menjawab Program Desa Mandiri ini cukup berpengaruh bagi akses ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan karena 7 orang atau 19% dari responden.

Wawancara peneliti dengan Camat Mandah tentang program ini; “program desa mandiri sangat mempengaruhi bagi akses ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan, memudahkan mereka untuk mobilisasi hasil pertanian dan hasil nelayan”. (Camat Mandah, Wawancara, 20 Februari 2012)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua BPD mengenai keberadaan atau peran Kepala Desa dalam Program Desa Mandiri ini; “program desa mempengaruhi ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan, dengan adanya program ini akan memudahkan akses untuk arus barang dan mobilisasi ekonomi masyarakat”. (Ketua BPD, Wawancara, 20 Januari 2013)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa ada pengaruh ekonomi bagi masyarakat Desa Pulau Cawan.

Program ini sangat berpengaruh bagi akses ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan, jika jawaban responden yang menjawab sangat mempengaruhi dan responden yang menjawab berpengaruh diakumulasikan maka 81% dari responden mengatakan bahwa Program Desa Mandiri ini sangat berpengaruh bagi ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan karena berada pada rentang persentase antara 81%-100%. Artinya lancarnya arus barang ke Pulau Cawan akan memperlancar ekonomi masyarakat, akan mudah membawa hasil pertanian dan pekebunan dari Pulau Cawan keluar dengan adanya Dermaga dan pembangunan jalan dan pembangunan jembatan melalui program Desa Mandiri.

C. Hasil Pembahasan Penelitian

Adapun yang menjadi hasil dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sikap pelaku pembuat kebijakan dengan Kegiatan Program Desa Mandiri

Menurut Carl Friedrich dalam Leo Agustino (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Dalam mendefinisikan kebijakan adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Menurut Anderson kebijakan

merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Dari penelitian ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sangat tepat dengan melibatkan masyarakat setempat dalam membangun daerahnya (desa)nya masing-masing. Antara teori dan praktek dilapangan yang sering terjadi ketimpangan.

Pelaku kebijakan paham dengan kegiatan Program Desa Mandiri. Pelaku kebijakan sangat mengerti dengan tujuan dan sasaran program ini untuk meningkatkan pembangunan di desa-desa tertinggal baik dalam prasarana dan infrastruktur di Kabupaten Inderagiri Hilir. Pelaku kebijakan tidak sepenuh hati untuk menjalankan program ini karena dari hasil penelitian masih banyak dari responden yang mengatakan bahwa program ini tidak berjalan dengan baik karena tidak ada kebijaksanaan dari pelaksana program. Kepala Desa sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah tidak melakukan pengawasan yang baik terhadap program ini.

Lingkungan sosial budaya mempengaruhi terhadap pelaksanaan Program Desa Mandiri, karena masyarakat setempat terkadang tidak mudah menerima suatu program karena ada dampak awal yang ditimbulkan dalam pembangunan dan pengerjaan program ini baik yang berhubungan dengan tanah mereka yang dilalui oleh program. Program Desa Mandiri ini sifatnya suadaya masyarakat atau keiklasan mereka untuk ikut berpartisipasi untuk menyukseskan Program Desa Mandiri kerana masyarakat dengan senang hati untuk memberikan tanah untuk mendukung program.

Sosial masyarakat juga memberikan pengaruh terlaksananya program ini karena masyarakat Desa Pulau Cawan bekerja sebagai petani dan nelayan mereka tidak bisa banyak berperanan dalam Program Desa Mandiri, karena mereka lebih memilih untuk bekerja dari pada terlibat dalam program ini demi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga.

Oleh karena itu setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu dilakukan peninjauan dan pengawasan agar setiap program berjalan dengan sesuai dengan tujuan program tersebut, karena Kabupaten Indragiri Hilir menyimpan potensi besar dalam berbagai sektor Perekonomian, terutama dibidang Perkebunan, Perikanan/kelautan dan Perindustrian dimana sampai saat ini belum tergarap secara maksimal. Disektor perkebunan, beberapa komoditi unggulan adalah kelapa lokal, kelapa hibrida, kelapa sawit dan sagu.

Pembangunan mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (*under-development*) ketergantungan (*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*). Karena pembangunan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sumua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara

sadar dan terencana dengan menggulirkan Program Desa Mandiri yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan menggulirkan Program Desa Mandiri ini merupakan kebijakan yang melibatkan masyarakat setempat untuk membangun dari bawah. Dalam beberapa teori menjelaskan bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat akan lebih berhasil. Akan tetapi pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap program tersebut, baik dengan sosialisasi dan pendampingan untuk merealisasikan kebijakan pemerintah daerah tersebut.

Kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2010-2014 dengan memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah produksi; serta meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan.

Prinsip pembangunan perdesaan, meliputi: (1) Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat, yang berorientasi kepada karakteristik dan kebutuhan serta aspirasi lokal; (2) Pembangunan yang partisipatif; kepemimpinan lokal dan kelembagaan perdesaan berperan penting dalam proses menuju keberlanjutan pembangunan; (3) Berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem wilayah perdesaan diperlukan penataan ruang perdesaan yang dapat mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan dan wilayah yang didukungnya, serta konservasi sumber daya alam.

2. Lingkungan, Sosial, Budaya, dan Politik Mempengaruhi Pelaksanaan Program Desa Mandiri

Program Desa Mandiri merumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga tidak lagi sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Mulai tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mencanangkan Program Desa Mandiri dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menjelaskan bahwa implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Sementara Leo Agustino (2008:7) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan

suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

Dari pendapat para ahli ini semua yang dijelaskan telah tersedia baik itu pendanaan dari program tersebut, dan juga implementasinya di lapangan. Secara umum semua yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan itu telah dipersiapkan oleh pemerintahan Pemda Indragiri Hilir. Secara keseluruhan kebijakan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah dilakukan dengan cukup baik karena semua indikator yang ditanyakan pada responden tidak semua yang mengatakan bahwa kebijakan Pemerintahan terlaksana dengan baik di lapangan. Namun manfaat dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sangat diharapkan oleh Masyarakat Desa Pulau Cawan karena secara ekonomi dan sosial kebudayaan sangat mendapat dampak yang positif dari pembangunan infrastruktur di Desa Pulau Cawa, program Desa Mandiri ini.

Kebijakan Pemerintah untuk menjalankan Program Desa Mandiri sudah tepat, dengan melibatkan semua elemen untuk membangun Indragiri Hilir dari keterbelakangan pembangunan mengingat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Indragiri Hilir baik dari sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan. Namun dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut harus melibatkan semua unsur yang ada dalam masyarakat di daerah tersebut.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas dapat penulis ambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Kebijakan Pemerintah dengan Program Desa Mandiri sudah sangat tepat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di beberapa Pedesaan di Kabupaten Indragiri Hilir mengingat potensi yang dimiliki dari sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut harus melibatkan semua unsur, dengan adanya program ini akan membuka akses bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada.
2. Keadaan ekonomi, sosial, budaya, politik mempengaruhi dalam mengimplementasikan program desa mandiri karena kebijakan Pemerintahan belum terlaksana dengan baik dilapangan. Dan manfaat dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sangat diharapkan oleh Masyarakat Desa Pulau Cawan karena secara ekonomi, sosial, kebudayaan, dan politik mendapat dampak yang positif dari pembangunan infrastruktur di Desa Pulau Cawa.

B. SARAN

Dari hasil penelitian diatas penulis menyampaikan sara-saran untuk mengimpelementasikan kebijakan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut ini;

1. Kepada Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir agar Program Desa Mandiri terus dilakukan untuk meningkatkan pembangunan di Pedesaan dengan melibatkan masyarakat setempat dengan menampung apa yang mereka butuhkan.
2. Kepada masyarakat Pedesaan agar berpartisipasi dan mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Indragiri Hilir demi terwujudnya Program Desa Mandiri ini dan tepat guna.
3. Kepada pelaksana Program Desa Mandiri ini agar menjalankan program ini dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.
4. Kepada semua pihak dan stekholder agar berpartisipasi mendukung program yang digulirkan oleh Pemerintah untuk mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kibijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Desa, Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kab. Lingga Prov. Kepulauan Riau*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____. 2001. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Modul kuliah MAP Universitas Gajah Mada
- Dye, Thomas. 1981. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prantice Hall, inc, Englewood Cliffs
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Effendi, Sofian. 1989. *Analisi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Modul Kuliah MAP Universitas Gajah Mada
- Ginanjar Kartasasmita. 1994. *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*. Jakarta: CIDEAS
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey
- Hogwood, Brian. W, and Lewis A. Gunn. 1984. *Policy Analysis For the Real World*. New York: Oxford University Press
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik; Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media
- Islamy, Irfan, M. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Juniarso Ridwan & Achmad Sodik. 2008. *Hukum Tata Ruang: Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nasuha
- Lexy J. Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA
- Nurcholis, Hanif, dkk. 2008. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo

- Prasojo, Eko, dkk. 2007. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Rian, Nugroho D. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis
- Rozali, Abdullah. 2003. *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada
- Siagian, P.Sondang. 2003. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Solichin, Abdul Wahab. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah
- _____. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Antitesisnya?.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Revisi, cet 4. Bandung: CV. Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syafrizal. 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Bandung: Baduose Media
- Tarigan, Antonius. 2000. *Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat*, Tesis Masigter Administrasi Publik UGM Yogyakarta
- Usman, Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wahab, Solichin A. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta
- Wayne, Parsons. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana

- Weimer, Davi. L. and Vining Aidan. R. 1999. *Policy Analysis: Concepts Dan Practice*. New Jersey: Prentice Hall
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta
- Widjaja, HAW. 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori & Proses*. Edisi revisi. Yogyakarta: Media Pressindo
- William, N Dunn. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Dalam Rangka Otonomi Menuju Desa Mandiri Tahun 2013
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 9 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa Dalam Rangka Otonomi Menuju Desa Mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir
- Evaluasi Program Desa Mandiri 2010

Lampiran: I Wawancara

No	Pernyataan	Keterangan
1.	Bagaimana tahap persiapan dan sosialisasi program PNPM Desa Mandiri	Tahap awal yang dilakukan seleksi desa merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam mempersiapkan pelaksanaan program desa mandiri. Proses seleksi dilakukan berdasarkan analisis desa dilakukan di tingkat kabupaten. Tujuan dilakukan seleksi desa adalah untuk mendapatkan daftar nama desa miskin sebagai calon penerima program desa mandiri. Sasaran pelaksanaan seleksi desa diarahkan kepada desa miskin yang memenuhi syarat yang ditetapkan bersama dan diutamakan desa yang belum pernah tersentuh proyek atau program pemerintah sebelumnya.
2.	Apa yang ingin dicapai dengan Program Desa Mandiri ini	Program Desa Mandiri ini, merupakan sebuah kebijakan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di desa-desa yang selama ini pembangunannya belum berjalan secara maksimal, melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di desa tersebut dengan melibatkan secara langsung masyarakat setempat, tentunya dengan peran Kepala Desa yang lebih besar, karena Kepala Desa yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah untuk mensukseskan program ini.
3.	Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Program Desa Mandiri	Tentunya Kepala Desa merupakan orang yang berada pada garis depan dalam melakukan pelaksanaan Program Desa Mandiri, karena dia yang selalu berada pada lokasi dilaksanakan program ini, Kepala Desa memegang peranan penting sejak dimulainya program ini sampai program terelisasi dengan sempurna.
4.	Bagaimana peranan DPRD Idragiri Hilir tentang program ini	Dalam program ini DPRD hanya sebagai pengawas program, untuk pelaksana dilapangan tentunya Kepala

		Desa yang lebih mengetahui bagaimana kebutuhan masyarakat yang diterapkan program Desa Mandiri, DPRD sebagai pengawas program ini tidak banyak terlibat dalam pelaksanaan, namun terus memantau sejauhmana program ini dijalankan.
5.	Bagaimana visi dan misi kepala desa dalam menjalankan program desa mandiri	Kepala Desa tentunya memiliki visi dan misi dalam melaksanakan Program Desa Mandiri, karena tanpa visi dan misi yang jelas tentunya program ini tidak jelas kemana arahnya, secara umum visi dan misi kepala desa jelas tentu agar program ini terlaksana dengan maksimal dan berdaya guna bagi masyarakat setempat.
6.	Bagaiman komitmen Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri	pelaksanaan program desa mandiri ini kepala desa sebagai orang yang terdepan dilapangan dalam melakukan pengawasan terhadap program ini tentunya memiliki komitmen yang kuat dan perencanaan yang matang, karena tanpa komitmen dalam melaksanakan program ini tidak ada artinya.
7.	Bagaimana kepala desa dalam memutuskan untuk pelaksanaan Program Desa Mandiri	dalam program desa mandiri ini mengutamakan hasil musyawarah antara kepala desa dengan masyarakat setempat untuk menentukan apa saja yang akan dibangun harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Program ini diawali dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakatnya untuk menentukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan apa yang penting dibangun untuk desa tersebut. Pelaksanaan program ini mesti didahului dengan melakukan musyarah yang dipimpin oleh kepala desa guna menentukan kebutuhan masyarakat, setelah itu baru ditentukan apa yang paling prioritas
8.	Bagaiman pandangan atau pemahaman masyarakat terhadap Desa Mandiri	pemahaman masyarakat tentang program ini tentu masih kurang karena ini merupakan program baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan desa.

		Program ini baru ya, secara umum masyarakat belum familiar dengan program ini, karena selama ini pembanguna selalu dilakukan oleh pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat setempat. pelaksanaan program ini secara umum masyarakat tidak mengetahuinya, karena selama ini pembangunan selalu dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat setempat, namun sekarang masyarakat dilibatkan dalam pembangunan ini.
9.	Adakah manfaat bagi masyarakat program Desa Mandiri	dalam perancangan program ini agar semua masyarakat merasakan manfaat dari program ini mulai dari masyarakat miskin sampai yang kaya. Program ini gunanya untuk seluruh masyarakat desa tersebut, diharapkan semua masyarakat mendapatkan manfaat dari program ini. Program ini diharapkan semua lapisan masyarakat mengambil manfaat dari program ini
10.	Bagai mana prasaran desa	Ketersedian sarana dan prasarana di Desa Pulau Cawan sangat kurang sekali, dengan adanya program ini diharapkan ada peningkatannya. Saran dan prasarana di Desa Pulau Cawan sangat jauh tertinggal dengan desa-desa lainnya, prasarana di desa ini tidak memadai.
11.	Bagaimana peranan perangkat desa dalam program desa mandiri	Perangkat desa mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program ini mestinya, namun pada kenyataannya mereka tidak banyak terlibat pada program ini. Perangkat desa tentu memiliki peranan yang penting dalam menyukseskan program ini, karena mereka merupakan bagian dari program ini.
12.	Dalam pelaksanaan program desa mandiri terjadi kesalahan-kesalahan	Program desa mandiri ini pada pelaksanaan banyak yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan program. Pelaksanaan program ini terkadang tidak tepat sasaran dan terkadang tidak

		sesuai dengan rencana awalnya.
13.	Apakah masyarakat menerima program desa mandiri	Masyarakat sangat setuju dengan program ini karena pada program ini memberi manfaat bagi masyarakat desa, dengan program masyarakat merasakan manfaatnya, terlepas dari berbagai kekurangan terhadap pelaksanaannya didesa. Program ini mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat karena melalui program ini pembangunan didesa mereka akan semakin maju.
14.	Bagaimana hasil dari program desa mandiri	Kinerja pelaksana program ini yang masih kurang, oleh karena itu perlu peningkatan kinerja bagi pelaksana program ini. Dalam setiap program selalu terjadi persoalan kinerja pelaksanaannya dilapangan yang selalu lalai dalam menjalankan tugas mereka. Program ini diperlukan kinerja yang baik dan kerjasama yang pula, karena tanpa kinerja yang baik dan kerjasama yang baik program ini tidak akan sukses dan sampai pada tujuannya.
15.	Keadaan sosial mempengaruhi pelaksanaan program desa mandiri	Keadaan sosial masyarakat mempengaruhi program ini, karena keadaan sosial mempengaruhi pelaksanaan program desa mandiri ini. Program ini mempengaruhi kehidupan sosial, karena masyarakat pada umumnya bekerja dan mereka tidak banyak membantu dalam pelaksanaan program.
16.	Keadaan budaya mempengaruhi program desa mandiri	Keadaan budaya kerja masyarakat mempengaruhi program ini, karena masyarakat pada umum nelayan dan bertani tentu mempengaruhi pelaksanaan program desa mandiri ini. Budaya kerja masyarakat tidak mempengaruhi program desa mandiri karena masyarakat pada umunya nelayan dan petani, karena masyarakat pada umumnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka.
17.	Tingkat pendidikan mempengaruhi pelaksanaan	Keadaan pendidikan masyarakat mempengaruhi program ini, karena

	program desa mandiri	pendidikan masyarakat pada umumnya berada pada tingkat SD hingga tamatan SMA. Tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi program desa mandiri karena masyarakat pada umumnya hanya tamatan SD sampai SMA dan ada yang tidak tamad SD, karena masyarakat pada umumnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka
18.	Bagaiman penilaian masyarakat terhadap hasil dari program desa mandiri	Masyarakat menilai program ini tidak terlaksana dengan baik oleh pelaksana program desa mandiri. Masyarakat mempunyai penilaian sendiri terhadap hasil dari program desa mandiri ini, masyarakat menialia program tidak terlaksana dengan baik.
19.	Keadaan alam mempengaruhi pelaksanaan program desa mandiri	Keadaan alam Desa Pulau Cawan tidak mempengaruhi pelaksanaan program desa mandiri, kultur desa yang bergambut dan rawa-rawa kurang mempengaruhi program ini. keadaan alam desa pulau cawan yang bergambut berawa-rawa kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan program desa mandiri.
20.	Bagaimana manfaat program desa mandiri bagi masyarakat	Dari segi manfaat, banyak sekali manfaat dari program ini, karena program ini ditujukan untuk membuka jalan dan membuat dermaga ini sangat menguntungkan bagi masyarakat. Hasil dari program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, program ini ditujukan untuk membangun jalan dermaga ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat
21.	Ada pengaruh terhadap ekonomi masyarakat dari program desa mandiri	Program ini ada pengaruhnya bagi ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan. Program desa ada pengaruhnya bagi ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan
22.	Secara ekonomi adakeh efek dari program desa mandiri	Program desa mandiri sangat mempengaruhi bagi akses ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan, memudahkan mereka untuk mobilisasi hasil pertanian dan hasil nelayan.

		Program desa mempengaruhi ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan, dengan adanya program ini akan memudahkan akses untuk arus barang dan mobilisasi ekonomi masyarakat.
--	--	---

KUISIONER PENELITIAN

A. Petunjuk Pengisian

1. Isilah jawaban sesuai dengan pilihan Anda
2. Isilah pada kolom/ pilihan jawaban yang telah disediakan
3. Beri tanda silang (x) pada jawaban yang Anda anggap benar

B. Identitas Responden

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin : a. Laki-laki
b. Perempuan
3. Pendidikan : a. Tidak Tamat SD b. SD/ Sederajat
c. SMP/ Sederajat d. SLTA
e. D-1, D-II, D-III f. S1, S2

- C. Pekerjaan utama** : a. Wiraswasta b. Petani/ Peternak
c. Usaha Kecil d. PNS
e. Pegawai swasta f. lainnya.....

- D. Umur** : a. 20-30 b. 31-40
c. 41-50 d. 51-60
e. 60 tahun ke atas

- E. Pendapatan perbulan** : a. di bawah 800.000 b. 800.000-1.500.00
c. diatas 1.500.000

Soal Kuisisioner

1. Bagaimana Keberadaan kepala desa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

2. Bagaimanakah Visi Misi Kepala desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

3. Bagaimana komitmen Kepala Desa dalam Pembangunan ?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

4. Bagaimana tanggapan responden terhadap keputusan dan arahan kepala desa?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik

- c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
5. Efektifkah keputusan kepala desa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan?
- a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
6. Berlaku adilkah Kepala Desa bagi masyarakatnya dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan?
- a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
7. Bagaimana peranan musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan?
- a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
8. Apakah saudara memahami PNPM Mandiri Perdesaan ?

- a. Sangat Paham
 - b. Paham
 - c. Cukup Paham
 - d. Kurang Paham
 - e. Tidak Paham
9. Apakah saudara mengetahui pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan?
- a. Sangat Paham
 - b. Paham
 - c. Cukup Paham
 - d. Kurang Paham
 - e. Tidak Paham
10. Apakah disiplin dalam melaksanakan program PNPM Mandiri Perdesaan selalu dilaksanakan ?
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak pernah
11. Adakah program PNPM Mandiri Perdesaan berpengaruh bagi masyarakat miskin di Desa Pulau Cawan?
- a. Sangat Berpengaruh
 - b. Berpengaruh
 - c. Cukup Berpengaruh
 - d. Kurang Berpengaruh
 - e. Tidak Berpengaruh
12. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Pulau Cawan ?

- a. Sangat Memadai
 - b. Memadai
 - c. Cukup Memadai
 - d. Kurang Memadai
 - e. Tidak Memadai
13. Apakah pemerintah selalu mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan ?
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak pernah
14. Bagaimana peranan perangkat desa dalam mensukseskan program PNPM Mandiri Perdesaan ?
- a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
15. Setujukah program PNPM Mandiri Perdesaan menjadi program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Cukup Setuju
 - d. Kurang Setuju
 - e. Tidak Setuju
16. Sudah berjalankah kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan

rencana?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Cukup Setuju
- d. Kurang Setuju
- e. Tidak Setuju

17. Apakah saudara setuju dengan ada program PNPM Mandiri Perdesaan ?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Cukup Setuju
- d. Kurang Setuju
- e. Tidak Setuju

18. Apakah menurut saudara kebijakan program PNPM Mandiri Perdesaan sudah tepat untuk pembangunan desa ?

- a. Sangat Tepat
- b. Tepat
- c. Cukup Tepat
- d. Kurang Tepat
- e. Tidak Tepat

19. Apakah saudara yakin ada peningkatan kinerja PNPM Mandiri Perdesaan?

- a. Sangat Yakin
- b. Yakin
- c. Cukup Yakin
- d. Kurang Yakin
- e. Tidak Yakin

20. Apakah pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan menimbulkan permasalahan?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Cukup Setuju
 - Kurang Setuju
 - Tidak Setuju
21. Apakah keadaan sosial mempengaruhi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ?
- Sangat Mempengaruhi
 - Mempengaruhi
 - Cukup Mempengaruhi
 - Kurang Mempengaruhi
 - Tidak Mempengaruhi
22. Apakah keadaan budaya mempengaruhi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ?
- Sangat Mempengaruhi
 - Mempengaruhi
 - Cukup Mempengaruhi
 - Kurang Mempengaruhi
 - Tidak Mempengaruhi
23. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan?
- Sangat Mempengaruhi
 - Mempengaruhi
 - Cukup Mempengaruhi
 - Kurang Mempengaruhi
 - Tidak Mempengaruhi

24. Apakah program-program PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Pulau Cawan telah terlaksana dengan baik ?
- Sangat Baik
 - Baik
 - Cukup Baik
 - Kurang Baik
 - Tidak Baik
25. Apakah keadaan Alam mempengaruhi program-program PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Pulau Cawan ?
- Sangat Mempengaruhi
 - Mempengaruhi
 - Cukup Mempengaruhi
 - Kurang Mempengaruhi
 - Tidak Mempengaruhi
26. Apakah program-program PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Pulau Cawan memberikan manfaat bagi masyarakat ?
- Sangat Bermanfaat
 - Bermanfaat
 - Cukup Bermanfaat
 - Kurang Bermanfaat
 - Tidak Bermanfaat
27. Apakah program-program PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Pulau Cawan meningkat pembangunan inprsatraktur umum ?
- Sangat Meningkatkan
 - Meningkatkan
 - Cukup Meningkatkan
 - Kurang Meningkatkan

- e. Tidak Meningkatkan
28. Apakah faktor budaya bisa mempengaruhi program PNPM Mandiri ?
- a. Sangat Mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup Mempengaruhi
 - d. Kurang Mempengaruhi
 - e. Tidak Mempengaruhi
29. Apa program PNPM mandiri Pedesaan ini ada pengaruhnya bagi kehidupan sosial masyarakat Desa Pulau Cawan ?
- a. Sangat Mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup Mempengaruhi
 - d. Kurang Mempengaruhi
 - e. Tidak Mempengaruhi
30. Apa program PNPM mandiri Pedesaan ini ada pengaruhnya bagi ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan ?
- a. Sangat Mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup Mempengaruhi
 - d. Kurang Mempengaruhi
 - e. Tidak Mempengaruhi
31. Apa program PNPM mandiri Pedesaan ini ada pengaruhnya bagi ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan ?
- a. Sangat Mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup Mempengaruhi
 - d. Kurang Mempengaruhi
 - e. Tidak Mempengaruhi

32. Apa program PNPM Mandiri Pedesaan ini ada pengaruhnya bagi akses ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan ?
- Sangat Mempengaruhi
 - Mempengaruhi
 - Cukup Mempengaruhi
 - Kurang Mempengaruhi
 - Tidak Mempengaruhi

KUISIONER PENELITIAN

PELAKSANAAN PROGRAM DESA MANDIRI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (STUDI KASUS DI DESA PULAU CAWAN TAHUN 2007-2010)



Disusun Oleh:

E R W I N

NIM: 016125555

**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS TERBUKA**

2012

DAFTAR WAWANCARA

Nama : E R W I N
NPM : 016125555
Program Magister Administrasi Publik : Universitas Terbuka (UT)

Daftara pertanyaan ini penulis gunakan untuk melengkapi penulisan skripsi penulis dengan judul: “Pelaksanaan Program Desa Mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus di Desa Pulau Cawan Tahun 2007-2010)”.

1. Bagaimana tahap persiapan dan sosialisasi program PNPM Mandiri dan Musdes Sosialisasi ?
2. Bagaimana perencanaan kegiatan program PNPM Mandiri di Desa ?

3. Bagaimanakah tahap pelaksanaan program PNPM Mandiri di Desa Pulau Cawan ?
4. Apakah yang akan dicapai dari program PNPM Mandiri di Desa Pulau Cawan ini ?
5. Kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah supaya program ini tepat sasaran ?
6. Manfaat apa yang diharapkan dari program PNPM Mandiri Pedesaan ini ?
7. Bagaimanakah tahap pemeliharaan setelah program PNPM Mandiri di Desa Pulau Cawan ini setelah dinyatakan selesai ?
8. Siapakah yang akan mengambil manfaat dari program PNPM Mandiri pedesaan ini ?
9. Apa saja faktor yang menjadi penghambat untuk menjalankan program PNPM Mandiri ini ?
10. Apakah faktor sosial menghambat terlaksananya program PNPM Mandiri ?
11. Apakah faktor budaya bisa menghambat pembangunan program PNPM Mandiri ?
12. Apakah tingkat penghasilan masyarakat bisa menghambat program PNPM Mandiri di Desa Pulau Cawan ?
13. Apa dampak bagi masyarakat dari kebijakan program PNPM Mandiri ?
14. Apakah program PNPM Mandiri disampaikan seperti yang dirancang ?
15. Apakah program PNPM Mandiri ini merupakan proyek individu atau dirancang dan didanai
16. Apakah tujuan dari Program PNPM Mandiri telah tercapai ?

17. Apa dampaknya bagi masyarakat Desa Pulau Cawan ?
18. Apakah Program PNPM Mandiri membawa perubahan bagi masyarakat Desa Pulau Cawan ?

Lampiran I: Tabel Persentase Pembahasan

1. Keberadaan kepala desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	16	43%
2	Baik	11	30%
3	Cukup Baik	6	16%
4	Kurang Baik	3	8%
5	Tidak Baik	1	3%
Jumlah		37	100%

2. Visi Misi Kepala desa dalam melaksanakan Program Desa Mandiri

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	17	46%
2	Baik	12	32%
3	Cukup Baik	4	11%
4	Kurang Baik	3	8%
5	Tidak Baik	1	3%
Jumlah		37	100%

3. Komitmen Kepala Desa dalam Pembangunan

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	18	49%
2	Baik	9	24%
3	Cukup Baik	5	14%
4	Kurang Baik	4	11%
5	Tidak Baik	1	3%
Jumlah		37	100%

4. Tanggapan responden terhadap keputusan dan arahan kepala desa

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	14	38%
2	Baik	5	14%
3	Cukup Baik	10	27%
4	Kurang Baik	5	14%
5	Tidak Baik	3	8%
Jumlah		37	100%

5. Keputusan kepala desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	14	38%
2	Baik	5	14%
3	Cukup Baik	10	27%
4	Kurang Baik	5	14%
5	Tidak Baik	3	8%
Jumlah		37	100%

6. Keadilan Kepala Desa bagi masyarakatnya dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	14	38%
2	Baik	5	14%
3	Cukup Baik	10	27%
4	Kurang Baik	5	14%
5	Tidak Baik	3	8%
Jumlah		37	100%

7. Peranan musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	14	38%
2	Baik	5	14%
3	Cukup Baik	10	27%
4	Kurang Baik	5	14%
5	Tidak Baik	3	8%
Jumlah		37	100%

8. Pemahami Masyarakat terhadap Program Desa Mandiri

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Paham	5	14%
2	Paham	2	5%
3	Cukup Paham	15	41%
4	Kurang Paham	7	19%
5	Tidak Paham	8	22%
Jumlah		37	100%

9. Pengetahui pelaksanaan Program Desa Mandiri

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Paham	15	43%
2	Paham	12	34%
3	Cukup Paham	5	14%
4	Kurang Paham	2	6%
5	Tidak Paham	1	3%
Jumlah		35	100%

10. Kedisiplin dalam melaksanakan Program Desa Mandiri selalu dilaksanakan

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat disiplin	14	38%
2	Disiplin	5	14%
3	Kadang-kadang disiplin	10	27%
4	Kurang disiplin	5	14%
5	Tidak disiplin	3	8%
Jumlah		37	100%

11. Program Desa Mandiri berpengaruh bagi masyarakat miskin di Desa Pulau Cawan

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Berpengaruh	16	43%
2	Berpengaruh	4	11%
3	Cukup Berpengaruh	9	24%
4	Kurang Berpengaruh	5	14%
5	Tidak Berpengaruh	3	8%
Jumlah		37	100%

12. Ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Pulau Cawan

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat disiplin		0%
2	disiplin		0%
3	Cukup disiplin	1	3%
4	Kurang disiplin	30	81%
5	Tidak disiplin	6	16%
Jumlah		37	100%

13. Pemerintah selalu mensosialisasikan Program Desa Mandiri

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Selalu	19	51%
2	Sering	7	19%
3	Kadang-kadang	4	11%
4	Jarang	4	11%
5	Tidak pernah	3	8%
Jumlah		37	100%

14. Peranan perangkat desa dalam mensukseskan Program Desa Mandiri

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	13	35%
2	Baik	7	19%
3	Cukup Baik	9	24%
4	Kurang Baik	5	14%
5	Tidak Baik	3	8%
Jumlah		37	100%

15. Program Desa Mandiri menjadi program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	15	41%
2	Setuju	5	14%
3	Cukup Setuju	9	24%
4	Kurang Setuju	5	14%
5	Tidak Setuju	3	8%
Jumlah		37	100%

16. Kegiatan Program Desa Mandiri sesuai dengan rencana

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	9	24%
2	Setuju	8	22%
3	Cukup Setuju	10	27%
4	Kurang Setuju	5	14%
5	Tidak Setuju	5	14%
Jumlah		37	100%

17. Setuju dengan ada Program Desa Mandiri

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	25	68%
2	Setuju	7	19%
3	Cukup Setuju	5	14%
4	Kurang Setuju		0%
5	Tidak Setuju		0%
Jumlah		37	100%

18. Kebijakan Program Desa Mandiri sudah tepat untuk pembangunan desa

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tepat	14	38%
2	Tepat	5	14%
3	Cukup Tepat	10	27%
4	Kurang Tepat	5	14%
5	Tidak Tepat	3	8%
Jumlah		37	100%

19. Peningkatan kinerja Program Desa Mandiri

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Yakin	15	41%
2	Yakin	5	14%
3	Cukup Yakin	9	24%
4	Kurang Yakin	5	14%
5	Tidak Yakin	3	8%
Jumlah		37	100%

20. Pelaksanaan Program Desa Mandiri menimbulkan permasalahan

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju		0%
2	Setuju		0%
3	Cukup Setuju		0%
4	Kurang Setuju	1	3%
5	Tidak Setuju	36	97%
Jumlah		37	100%

21. Sosial mempengaruhi pelaksanaan Program Desa Mandiri

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mempengaruhi	17	46%
2	Mempengaruhi	5	14%
3	Cukup Mempengaruhi	7	19%
4	Kurang Mempengaruhi	5	14%
5	Tidak Mempengaruhi	3	8%
Jumlah		37	100%

22. Keadaan budaya mempengaruhi pelaksanaan Program Desa Mandiri

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mempengaruhi	19	51%
2	Mempengaruhi	1	3%
3	Cukup Mempengaruhi	8	22%
4	Kurang Mempengaruhi	6	16%
5	Tidak Mempengaruhi	3	8%
Jumlah		37	100%

23. Tingkat pendidikan mempengaruhi pelaksanaan Program Desa Mandiri

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mempengaruhi	20	54%
2	Mempengaruhi	7	19%
3	Cukup Mempengaruhi	7	19%
4	Kurang Mempengaruhi	2	5%
5	Tidak Mempengaruhi	1	3%
Jumlah		37	100%

24. Program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan telah terlaksana dengan baik

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	8	26%
2	Baik	5	16%
3	Cukup Baik	10	32%
4	Kurang Baik	5	16%
5	Tidak Baik	3	10%
Jumlah		31	100%

25. Keadaan Alam mempengaruhi Program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mempengaruhi	15	41%
2	Mempengaruhi	5	14%
3	Cukup Mempengaruhi	9	24%
4	Kurang Mempengaruhi	5	14%
5	Tidak Mempengaruhi	3	8%
Jumlah		37	100%

26. Program Desa Mandiri di Desa Pulau Cawan memberikan manfaat bagi masyarakat

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Bermanfaat	18	49%
2	Bermanfaat	12	32%
3	Cukup Bermanfaat	7	19%
4	Kurang Bermanfaat		0%
5	Tidak Bermanfaat		0%
Jumlah		37	100%

27. Faktor budaya bisa mempengaruhi Program Desa Mandiri

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mempengaruhi	18	49%
2	Mempengaruhi	12	32%
3	Cukup Mempengaruhi	7	19%
4	Kurang Mempengaruhi		0%
5	Tidak Mempengaruhi		0%
Jumlah		37	100%

28. Program Desa Mandiri ini ada pengaruhnya bagi kehidupan sosial masyarakat Desa Pulau Cawan

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mempengaruhi	18	49%
2	Mempengaruhi	12	32%
3	Cukup Mempengaruhi	7	19%
4	Kurang Mempengaruhi		0%
5	Tidak Mempengaruhi		0%
Jumlah		37	100%

29. Program Desa Mandiri ini ada pengaruhnya bagi ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mempengaruhi	20	54%
2	Mempengaruhi	12	32%
3	Cukup Mempengaruhi	5	14%
4	Kurang Mempengaruhi		0%
5	Tidak Mempengaruhi		0%
Jumlah		37	100%

30. Program Desa Mandiri ini ada pengaruhnya bagi akses ekonomi masyarakat Desa Pulau Cawan

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mempengaruhi	19	51%
2	Mempengaruhi	11	30%
3	Cukup Mempengaruhi	7	19%
4	Kurang Mempengaruhi		0%
5	Tidak Mempengaruhi		0%
Jumlah		37	100%



BUPATI INDRAGIRI HILIR

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 09 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA
DALAM RANGKA OTONOMI MENUJU DESA MANDIRI
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- bahwa agar pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa Dalam Rangka Otonomi Menuju Desa Mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan dengan baik, lancar, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku, perlu dilengkapi dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa Dalam Rangka Otonomi Menuju Desa Mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Utara di Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/Kelurahan;
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2003 Nomor 09);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DALAM RANGKA OTONOMI MENUJU DESA MANDIRI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Indragiri Hilir.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir.
10. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala BPMPD, adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir.
11. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang berada di Kecamatan.
12. Lurah adalah Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab Kepada Bupati melalui Camat.
13. Kepala Desa adalah Perangkat Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.
14. Program Pemberdayaan Desa Dalam Rangka Otonomi Menuju Desa Mandiri, yang selanjutnya disebut Program Desa Mandiri, adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat perdesaan yang makmur, mandiri dan sejahtera sesuai visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang Tahun 2025.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPM adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Kelompok Kerja, yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekumpulan orang atau masyarakat setempat yang ditetapkan sebagai tenaga kerja pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan.

BAB II PRINSIP DASAR PROGRAM

Pasal 2

Prinsip dasar kebijakan Desa Mandiri adalah :

- a. Memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Desa secara lebih luas untuk percepatan pembangunan desa;
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek pembangunan;
- c. Pemerataan pengalokasian dana dan kegiatan pembangunan ke seluruh desa/kelurahan di Daerah;
- d. Menciptaan peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

BAB III PEMBIAYAAN

Bagian Pertama Alokasi Dana

Pasal 3

- (1) Pagu dana untuk setiap Desa dalam rangka pelaksanaan Program Desa Mandiri, ditentukan bervariasi yakni sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditentukan oleh berbagai indikator.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPMPD.
- (3) Pada beberapa Desa/Kelurahan dapat ditetapkan pagu dana sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dengan tujuan :
 - a. Mendorong desa yang sudah relatif maju untuk maju lagi guna dijadikan sebagai pelaksanaan pilot project otonomi desa kedepannya;
 - b. Mendorong percepatan pembukaan aksesibilitas guna mengangkat desa terpuruk dari kertinggalan dan keterisolasian;
 - c. Mendorong memajukan desa-desa yang berada pada daerah perbatasan Propinsi dan Kabupaten.

Pasal 4

Alokasi dana Program Desa Mandiri dibagi dalam dua komponen yakni :

- a. Dana operasional/rutin (tidak langsung) maksimal sebesar 40 % dari pagu dana.
- b. Dana pembangunan (belanja langsung).

Pasal 5

Penetapan Alokasi Dana Program Desa Mandiri dilakukan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
PENGUNAAN DANA****Pasal 6**

Penggunaan Dana Program Desa Mandiri bersifat terbuka (*open menu*) dan tidak terfokus untuk pembangunan infrastruktur saja.

**BAB IV
KEGIATAN PROGRAM OTONOMI DESA****Bagian Pertama
Sasaran Kegiatan****Pasal 7**

- (1) Sasaran kegiatan Program Desa Mandiri pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan yang secara teknis bersifat sederhana dan atau kegiatan yang bahan materialnya secara umum tersedia dan atau kegiatan-kegiatan lain yang sudah dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan atau kegiatan yang mendukung kepada program K2I Propinsi Riau.
- (2) Kegiatan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, diprioritaskan dibangun dengan konstruksi permanen.
- (3) Mengingat bahwa benekanan pelaksanaan program desa mandiri adalah pemberdayaan masyarakat, maka untuk 1 (satu) kegiatan dapat dijadikan 2 paket pekerjaan dengan Pokja yang berbeda.

**Bagian Kedua
Kebijakan Khusus****Pasal 8**

- (1) Bagi Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, dapat mempergunakan Dana Program Desa Mandiri maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembiayaan honorarium panitia, pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), dan biaya operasional lainnya.
- (2) Desa tidak diperkenankan membangun kegiatan untuk instansi vertikal dan atau membangun sarana dan prasarana olah raga dengan menggunakan dana Program Desa Mandiri, kecuali pembangunan tersebut merupakan pekerjaan *Over Prestasi* dan atau dibiayai dengan dana Pendapatan Asli Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan Program Desa Mandiri diperkenankan menggunakan alat berat dengan ketentuan biaya sewa alat, biaya mobilisasi dan demobilisasi alat berat tidak dibebankan kepada anggaran Program Desa Mandiri.

- (4) Pembangunan balai desa desain teknisnya terbuka.
- (5) Bagi desa-desa yang infrastrukturnya sudah memadai, harus mengarahkan penggunaan dana Program Desa Mandiri untuk peningkatan sumberdaya manusia aparatur desa dan menunjang kepada kegiatan ekonomi masyarakat.
- (6) Penggunaan dana Program Desa Mandiri dapat digunakan untuk membangun dan atau merehabilitasi jalan poros dan atau jalan penunjang antar desa, serta boleh dilakukan kerjasama antar desa untuk membangun satu kegiatan.
- (7) Pelaksanaan kegiatan Program Desa Mandiri tidak dikenakan pajak.
- (8) Bagi Desa yang melakukan pemekaran, maka desa yang baru terbentuk harus tetap dialokasikan kegiatan oleh desa induk termasuk insentif bagi Kepala Dusun, RW dan RT.

Bagian Ketiga
Perubahan Kegiatan

Pasal 9

Perubahan (revisi) kegiatan dapat dilaksanakan setelah dimusyawarahkan, diketahui oleh Camat dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran atau Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir.

Pasal 10

Penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan Program Desa Mandiri diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala BPMPD.

**BAB V
PENYALURAN DANA**

Pasal 11

- (1) Pencairan Dana Program Desa Mandiri dicairkan oleh Kas Daerah, terakhir tanggal 20 Desember Tahun Anggaran berjalan dan penggunaan dananya di lapangan terikat Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Kepala Desa harus terlebih dahulu menyampaikan dokumen persyaratan pencairan dana kepada Kepala BPMPD guna diteliti dan dimintakan rekomendasi, sebelum menyampaikan dokumen pencairan dana ke Kas Daerah.
- (3) Jika dokumen pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai lengkap, Kas Daerah atau Bagian Keuangan Sekeratariat Daerah menerbitkan SPP, SPM, SP2D dan Cek.
- (4) SP2D dan Cek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa ke Bank Riau guna pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Desa.

**BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 12

- (1) Bagi Desa yang melaksanakan pemilihan baru pengurus LPM, paling lambat 1 bulan setelah pemilihan tersebut harus menyampaikan Berita Acara dan susunan pengurus yang baru dibentuk kepada Kepala BPMPD yang diketahui Camat.

- (2) Bagi Desa yang melaksanakan pembentukan BPD yang baru, paling lambat 2 bulan setelah pembentukan harus dikukuhkan.
- (3) Pengukuhan BPD dapat dilakukan oleh Camat atas nama Bupati, dan Berita Acara pengukuhan harus segera disampaikan kepada Kepala BPMPD.
- (4) Paling lambat setelah tahun anggaran berakhir, Kepala Desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BPD.
- (5) Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja tidak langsung (rutin) terpisah dengan SPJ pembangunan.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama Tingkat Kabupaten

Pasal 13

- (1) Bupati dan Wakil Bupati adalah selaku Penanggung Jawab Program Desa Mandiri.
- (2) Sekretaris Daerah adalah selaku Ketua Pengarah Program Desa Mandiri dengan anggota Para Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala BAPPEDA selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program Desa Mandiri dengan anggota Kepala Badan/Dinas/Kantor yang terkait dengan kegiatan.
- (4) BPMPD adalah selaku Sekretariat Sektor Pelaksana Program Desa Mandiri Bidang Infrastruktur.
- (5) Struktur Organisasi Program Desa Mandiri Tingkat Kabupaten lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tingkat Kecamatan

Pasal 14

- (1) Camat sebagai Koordinator Pembina Program Desa Mandiri di Kecamatan.
- (2) Struktur Organisasi Program Desa Mandiri Tingkat Kecamatan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Camat yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tingkat Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa/Lurah memfasilitasi, mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Desa Mandiri di Desa atau Kelurahan masing-masing.
- (2) BPD bersama dengan kelembagaan desa atau kelembagaan kelurahan lainnya, merumuskan dan memusyawarahkan rencana kegiatan dan Pokja serta memantau pelaksanaan kegiatan dan menggerakkan swadaya gotong royong.
- (3) Sekretaris Desa atau Sekretaris Lurah adalah selaku Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan (PTPKD) bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

- (4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah selaku pembantu Kepala Desa/Lurah dalam hal perencanaan pembangunan dan menggerakkan gotong royong masyarakat serta membantu Kepala Desa/Lurah dan Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah dalam penyediaan material kebutuhan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Program Desa Mandiri.
- (5) Struktur Organisasi Program Desa Mandiri Tingkat Desa/Kelurahan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VIII PENDAMPING

Pasal 16

- (1) Agar pelaksanaan Program Desa Mandiri dapat berjalan dengan baik, lancar, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibutuhkan adanya Pendamping.
- (2) Pendamping sebagai fasilitator pelaksanaan Program Desa Mandiri ditempatkan sebanyak dua orang setiap Kecamatan.
- (3) Mengingat luasnya wilayah dan sulitnya geografis daerah serta guna lebih terkoordinasinya kinerja Pendamping, di bagi dua wilayah Koordinator Pendamping yakni Wilayah Utara dan Wilayah Selatan.

BAB IX INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 17

Keberhasilan pelaksanaan Program Desa Mandiri di Desa/Kelurahan ditentukan oleh indikator sebagai berikut :

- a. Kualitas hasil pelaksanaan Program Desa Mandiri sesuai dengan Rancangan Teknis;
- b. Adanya *over prestasi* pekerjaan;
- c. Ternggalinya potensi swadaya masyarakat dan meningkatnya semangat gotong-royong dalam pelaksanaannya;
- d. Pengelola Kegiatan mampu menyelesaikan segala administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan Program Desa Mandiri secara tepat waktu;
- e. Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan mampu bersinergi dan satu persepsi dalam menyikapi dan melaksanakan Program Desa Mandiri.

BAB X SANKSI

Pasal 18

- (1) Apabila kelembagaan yang ada di Desa/Kelurahan tidak sinerginya dalam melaksanakan Program Desa Mandiri, maka penyaluran dana ditunda dan atau pelaksanaan kegiatan dihentikan dan atau pengelolaan kegiatan diserahkan sepenuhnya ke Kecamatan.
- (2) Dalam hal terjadi kerucuhan dalam pelaksanaan kegiatan Program Desa Mandiri dan atau kegiatan Program Desa Mandiri tidak selesai pada batas waktu yang diberikan, *plafond* dana terhadap Desa/Kelurahan yang bersangkutan akan dikurangi dan atau terhadap Desa/Kelurahan yang bersangkutan tidak akan dialokasikan anggaran untuk tahun berikutnya.

Pasal 19

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak menghilangkan sanksi hukum lain sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan atau Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Bupati dan Peraturan Pelaksanaan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala BPMPD.

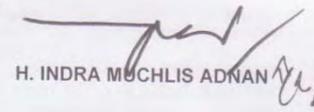
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

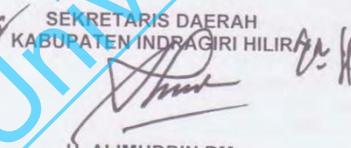
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 2 JUNI 2010


BUPATI INDRAGIRI HILIR,


H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 2 JUNI 2010


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,


H. ALIMUDDIN RM
Pembina Utama Madya
NIP. 19550621 198603 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2010 NOMOR